





LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

TAHUN 2024

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

diperindag@blitarkab.go.id

diperindag.blitarkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja (Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 disusun sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), yang mewajibkan tiap Penjenan Departemen/Lembaga Pemerintahan Non Departemen, Pemerintah Daerah, Satuan Kerja atau Unit Kerja di dalamnya, membuat laporan kinerja secara berjenjang serta berkala untuk disampaikan kepada atasannya. Serta sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja, bahwa peraturan tersebut sebagai acuan setiap instansi dalam menyusun dokumen Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja.

Sebagai gambaran keberhasilan dan ketidakberhasilan misi dan tujuan organisasi serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama periode tahun 2024, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Dilampirkan LKjIP ini dapat menjadi bahan masukan bagi perangkat kepentingan, khususnya bagi semua unit kerja yang ada untuk meningkatkan kinerja masing-masing di masa yang akan datang.

Blitar, 28 Februari 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar

DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700405 199101 1 002

IKHTISAR EKSEKUTIF

Peran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam pembangunan ekonomi Kabupaten Bitar adalah meningkatkan daya saing industri pengolahan dan peningkatan perdagangan dalam rangka menopang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bitar. Struktur perekonomian Kabupaten Bitar didominasi oleh sektor pertanian diusul perdagangan serta industri pengolahan. Pada tahun 2024 sektor perdagangan serta industri pengolahan berkontribusi sebesar 34,79%. Artinya bahwa sektor industri dan perdagangan berperan sebagai motor penggerak utama perekonomian Kabupaten Bitar.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok, fungsi dan misi yang diamanatnya. Hal ini tercermin dari pencapaian Indikator Kinerja Utama Tahun 2024, secara umum telah dapat memenuhi target yang ditetapkan.

TUJUAN : Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah mendapat predikat dengan Kategori **sangat baik**. Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran 2 (dua) indikator tujuan melalui 5 (tiga) Sasaran Strategis yang terdiri atas 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan kategori **sangat baik**.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR iii

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Pengalaman Umum Organisasi 1

B. Aspek Strategis Organisasi 3

C. Dasar Hukum 8

D. Sistematika Dokumen 9

BAB II PERENCANAAN KINERJA 11

A. Visi dan Misi 11

B. Tujuan dan Sasaran 11

C. Indikator Kinerja Utama 12

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024 13

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024 14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 18

A. Pengukuran Kinerja 18

B. Capaian Kinerja Organisasi 19

1. Menjelaskan Definisi Operasional Setiap Indikator Kinerja

2. Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun ini

3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

4. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional

6. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran

9. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian kinerja sasaran Indikator Pengelolaan 51

C. Realisasi Anggaran 55

BAB IV PENUTUP 68

A. Kesimpulan 68

B. Permasalahan dan Kendala 69

C. Rencana Tindak Lanjut 69

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data ASN Dinas Pendidikan dan Perdagangan Kabupaten Blitar	3
Tabel 1.2	Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah	6
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah	11
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Tahun 2024	14
Tabel 2.4	Rincian Anggaran Pada Tahun 2024	14
Tabel 3.1	Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja	18
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja	19
Tabel 3.3	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis	19
Tabel 3.4	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun-Tahun Sebelumnya	21
Tabel 3.5	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target Jangka Menengah Renstra	21
Tabel 3.6	Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur	22
Tabel 3.7	Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	23
Tabel 3.8	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis	28
Tabel 3.9	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Peringangan	30
Tabel 3.10	Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Peringangan terhadap target jangka menangah Renstra	30
Tabel 3.11	Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional	31
Tabel 3.12	Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan	34
Tabel 3.13	Capaian Indikator Kinerja Kunci atau Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2024	41
Tabel 3.14	Upaya Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat Kabupaten Blitar Tahun 2024	42
Tabel 3.15	Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten Blitar Tahun 2024	42
Tabel 3.16	Rekapitulasi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP Tahun 2024	43
Tabel 3.17	Daftar Pelaku Usaha yang Bersiliasi dengan Marketplace dan E-Catalog Kabupaten Blitar Tahun 2024	44
Tabel 3.18	Realisasi Kinerja Sasaran Strategis	45
Tabel 3.19	Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	48
Tabel 3.20	Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan Terhadap Target Jangka Menangah Renstra	48
Tabel 3.21	Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur	48

Tabel 3.22 Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan 48
Tabel 3.23 Capaian Indikator Kinerja Kunci Atau Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Tahun 2024 52
Tabel 3.24 Perkembangan Industri Kecil Per Kecamatan di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024 53
Tabel 3.25 Capaian Target Tahapan Pencapaian RPIK 2024 – 2044 54
Tabel 3.26 Capaian Target Tahapan Pencapaian RPIK 2024 – 2044 54
Tabel 3.27 Realisasi Kinerja dan Keuangan 56
Tabel 3.28 Realisasi Kinerja Sasaran dan Keuangan 67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar	2
Gambar 3.1	Nilai Ekspor Non Migas Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024	54
Gambar 3.2	Jumlah Tenaga Kerja Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024	55
Gambar 3.3	Nilai Investasi Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024	56

BAB I

PENDAHULUAN

A. Penjelasan Umum Organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar merupakan Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah tersebut maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menyelenggarakan urusan pemerintahan pada bidang Perdagangan dan Perindustrian.

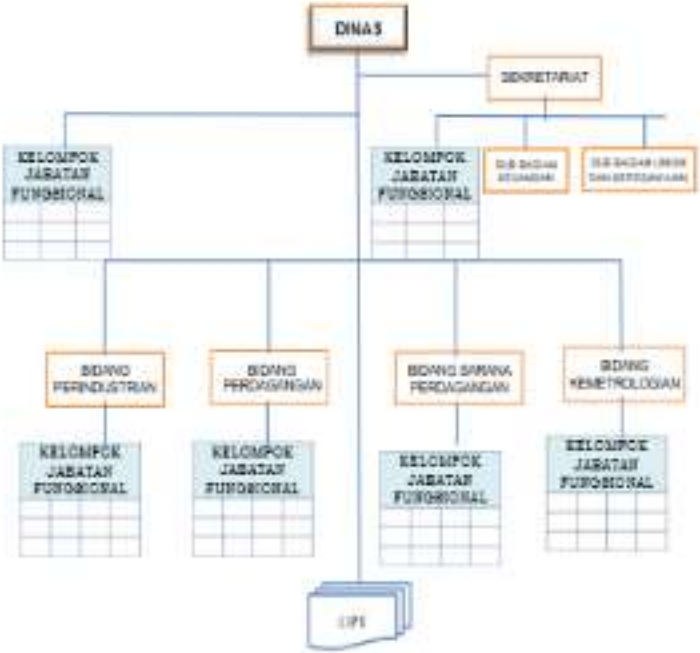
Melalui Peraturan Daerah diatas maka disusun Peraturan Bupati Blitar Nomor 82 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Dalam ketentuan tersebut menyebutkan Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar mempunyai tugas membantu Bupati melalui Sekretaris Daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang perindustrian dan perdagangan, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah serta tugas pembantuan sesuai dengan peraturan yang berlaku untuk mewujudkan capaian kinerja optimal. Dalam melaksanakan tugas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar menyelenggarakan fungsi:

1. Pengoordinasian perumusan rencana dan program kerja Dinas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
2. Pengoordinasian pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang urusan perindustrian dan urusan perdagangan;
3. Perumusan kebijakan di bidang perindustrian dan bidang perdagangan;
4. Pembinaan UPT;
5. Pengoordinasian pelaksanaan urusan tata usaha Dinas; dan
6. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain berdasarkan tugas yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar maka disusun struktur organisasi. Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dipimpin oleh Kepala Dinas yang dibantu oleh Sekretariat dan bidang teknis. Adapun susunan organisasi

Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah sebagai berikut.

Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi
Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar
(Peraturan Bupati Blitar Nomor 62 Tahun 2023)



Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar memiliki ASN sebanyak 66 Orang. ASN tersebut terbagi kedalam jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi dan jabatan fungsional. Berikut data ASN pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada akhir tahun 2024.

Tabel 1.1

Data ASN Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar

No	Jenis Jabatan	Jumlah
1	Kepala Dinas	1 Orang
2	Administrator	4 Orang
3	Pengawas	3 Orang
4	Pelaksana	19 Orang
5	Jabatan Fungsional Ahli Muda	9 Orang
6	Jabatan Fungsional Terampil	3 Orang
	Total	**38 Orang**

Dalam mendukung pencapaian kinerja Program Kegiatan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2024 memberdayakan 98 orang Tenaga Harian Lepas (THL) yang didistribusikan sebagai Tenaga Administrasi Kantor (11 orang), Tenaga Teknis Administrasi Pasar (52 orang), Petugas Kebersihan Pasar (19 orang), dan Petugas Pengamanan Pasar (11 orang).

B. Aspek Strategis Organisasi

Permasalahan pembangunan adalah kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan target yang direncanakan, dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan tersebut harus dapat diidentifikasi oleh Perangkat Daerah untuk dicarikan rekomendasi penanganannya. Rumusan permasalahan yang telah diidentifikasi berbasiskan data kesenjangan (gap) antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan, kemudian rumusan permasalahan tersebut dipetakan menjadi masalah pokok, masalah dan akar masalah. Berikut pemetaan permasalahan pokok, masalah dan akar masalah pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar.

Tabel 1.2
Pemetaan Permasalahan Pokok, Masalah dan Akar Masalah

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
1.	Rendahnya produktivitas industri	Kurang optimalnya sarana industri pengolahan untuk produk-produk unggulan daerah	Lebarnya sector industri dengan sector lainnya yang relatif rendah
		Kurang optimalnya perancangan dan dukungan data/informasi industri	Kurang optimalnya sistem informasi dan updating data industri
			Kurang optimalnya perumusan kebijakan pengembangan industri
		Kurang optimalnya penerapan standardisasi, desain produk, dan teknologi industri	Produk Industri Kecil masih banyak yang belum memenuhi standardisasi
			Masih rendahnya kualitas, desain dan kemasan produk industri kecil
			Lemahnya penerapan teknologi tepat guna bagi industri kecil
	Bidang Perdagangan		
	Pertumbuhan Kontribusi Perdagangan Kontribusi Terhadap PDRB Meningkat	Perluasan pasar produk yang kurang optimal	Kurang optimalnya penggunaan produk-produk daerah dalam aktivitas pemerintahan dan masyarakat
			Kurang optimalnya pengendalian barang impor
			Kurang optimalnya peran dan pemanfaatan hasil kerjasama perdagangan antar daerah
			Tingginya biaya distribusi dan logistik
			Kurang optimalnya fasilitasi pembiayaan untuk pelaku usaha perdagangan
			Fluktuasi harga barang pokok dan penting
			Kualitas infrastruktur pasar di tingkat Kecamatan yang kurang memadai
		Belum optimalnya perlindungan konsumen dan tertib niaga	Beredarnya produk yang beredar tidak sesuai dengan standar

No.	Permasalahan Pokok	Permasalahan	Akar Permasalahan
			Kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap barang berakar dan tarik ulang
		Belum optimalnya standardisasi mutu barang	Keterbatasan layanan pemilihan kewenangan (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi

Sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siliar Tahun 2021-2026, Bab. III, maka isu-isu strategis pada urusan Perindustrian dan perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Pengembangan industri berbasis sentra-sentra industri

   Pengembangan industri berbasis sentra-sentra industri perlu dilakukan dalam upaya meningkatkan kontribusi sector industry dalam perekonomian, baik dalam kontribusi pada PDRB, penyerapan tenaga kerja, dan menciptakan brending daerah.
2. Revitalisasi pasar rakyat perlu terus dilakukan untuk pengembangan pasar produk unggulan daerah dan melayani kebutuhan masyarakat, peningkatan kontribusi pada PDRB dan PAD.
3. Perlunya optimalisasi perlindungan konsumen

   Hal ini dilakukan melalui uji UTTP, pengawasan standardisasi produk, edukasi, dan pengendalian harga bahan pokok dan penting.
4. Perlunya peningkatan kerjasama perdagangan dan industri antar daerah maupun dengan swasta untuk perluasan pasar produk unggulan daerah yang diintegrasikan dengan *e-commerce*.
5. Perencanaan pembangunan dan pengembangan industri sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Siliar Tahun 2024-2044 perlu segera ditindaklanjuti dengan penyusunan Peraturan Bupati sebagai pedoman pelaksanaannya.
6. Perlunya kerja sama perdagangan dan industri antar daerah maupun dengan swasta untuk perluasan pasar produk unggulan daerah serta diintegrasikan dengan *e-commerce*.
7. Perlunya updating data industri dan perdagangan yang diintegrasikan dengan system informasi industri dan perdagangan.
8. Perlunya upgrading SDM di bidang perindustrian dan perdagangan secara berkelanjutan yang disertai dengan *rewards and punishment* yang jelas.

Adapun isu strategis seperti yang tertuang dalam Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Perubahan ke-II) pada BAB III, diuraikan sebagai berikut :

1. Peningkatan daya saing industri melalui penguatan struktur industri (hulu-antara-hilir), optimalisasi penaperan teknologi industri, standarisasi industri, peningkatan kualitas dan desain produk industri, penguatan sistem informasi dan data industri, serta percepatan substitusi impor untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan baku impor;
2. Peningkatan neraca perdagangan non-migas luar negeri, melalui optimalisasi pemanfaatan peran kerjasama perdagangan internasional, pengendalian impor, serta peningkatan kinerja ekspor non-migas;
3. Peningkatan pengembangan perdagangan dalam negeri, melalui peningkatan promosi dan kerjasama perdagangan swasta dan swasta, swasta dengan pemerintah, maupun pemerintah dengan pemerintah, pengendalian fluktuasi atau gejolak harga-harga barang kebutuhan pokok dan barang penting;
4. Pengoptimalan perlindungan konsumen melalui peningkatan pengawasan barang beredar serta peningkatan edukasi bagi masyarakat berkaitan dengan barang beredar dan tertib niaga;
5. Optimalisasi standarisasi mutu barang, melalui peningkatan layanan penilaian kesesuaian (mutu barang dan jasa) dan kalibrasi serta peningkatan pengembangan mutu teknikalnya.

Sedangkan isu nasional yang masih menjadi perhatian dan menjadi sangat penting agar kolaborasi pembangunan antara pusat dan daerah baik di sektor industri maupun perdagangan dapat berjalan secara berkesinambungan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten.

   Isu terkait ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten masih menjadi tantangan bagi pemerintah maupun *stakeholder* terkait. Berbagai upaya telah dilakukan diantaranya pengembangan kompetensi bagi tenaga kerja industri agar dapat meng- *upgrade* skill sehingga meningkatkan produktivitas kinerja industri nasional. Berkaitan dengan isu tersebut diharapkan pemerintah agar terus berupaya meningkatkan program pengembangan SDM industri secara berkesinambungan mengingat Indonesia mempunyai keuntungan bonus demografi yang harus dimanfaatkan, utamanya untuk sektor perindustrian.

2. Alih Fungsi Lahan (Hutan dan Pertanian)

Semakin tingginya aktivitas alih fungsi lahan khususnya pada hutan dan pertanian untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Kondisi ini tentu memiliki dampak positif dan negatif. Dimana dampak positif adalah semakin meningkatnya laju pembangunan perekonomian yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sedangkan dampak negatifnya adalah semakin tingginya risiko bencana erosi dan banjir, menurunnya ketahanan pangan, dan ketersediaan air bersih yang semakin sedikit. Kelompok masyarakat yang terkena dampak secara umum adalah seluruh penduduk Kabupaten Blitar. Secara khusus dampak dari pelaksanaan program tersebut akan berpengaruh terhadap pemerintah Kabupaten Blitar (elaku stakeholder, pelaku industri dan pertanian, dan petani (baik buruh tani maupun pemilik lahan).

3. Perubahan Iklim

Beberapa rencana program dalam RPJMD Kabupaten Blitar yang berdampak negatif terhadap elemen lingkungan terutama perubahan iklim. Rencana program tersebut umumnya meningkatkan kadar emisi gas rumah kaca (GRK) yang dilepaskan, sehingga perlu intervensi berupa upaya adaptasi dan mitigasi untuk mengurangi dampak negatifnya.

4. Penurunan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Alam

Program pembangunan sektor industri dan perdagangan di Kabupaten Blitar berpotensi mengakibatkan penurunan kualitas dan kuantitas sumber daya alam. Sebagian besar kegiatan industri misalnya, menghasilkan limbah, diantaranya campah. limbah cair yang dapat menurunkan kualitas air sungai dan gas buang yang mengakibatkan polusi udara. Dengan demikian, perlu perhatian yang sungguh-sungguh untuk mengurangi dampak negatif kegiatan pembangunan terhadap kualitas dan kuantitas sumber daya alam tersebut.

5. Kesejahteraan Rakyat

Kegiatan pembangunan industri dan perdagangan selama lima tahun ke depan diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat, mengurangi pengangguran, dan menurunkan tingkat kemiskinan.

6. Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri

Berbagai upaya dilakukan pemerintah untuk mendorong penggunaan produk dalam negeri, salah satunya melalui penerbitan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembinaan dan Penataan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko. Salah satu hal pokok yang diatur Peraturan Menteri ini dalam adalah Kewajiban Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern untuk menyediakan barang dagangan produksi dalam negeri paling sedikit 80% dari jumlah dan jenis barang yang diperdagangkan. Pemberlakuan peraturan ini merupakan tantangan sekaligus peluang bagi produk dalam negeri.

7. Kenaikan Upah Buruh dan Harga TDL untuk Industri

Upah buruh dan tarif dasar listrik yang semakin meningkat menjadi kendala tersendiri bagi sektor industri. Kenaikan TDL dan tingkat upah buruh ini jelas mempengaruhi daya saing industri karena akan menaikkan biaya produksi.

C. Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2024 adalah:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rancana Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rancana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rancana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar

Tahun 2021-2026;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat daerah Kabupaten Blitar;
9. Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar;
10. Peraturan Bupati Blitar Nomor 68 Tahun 2021 tentang Rencana Strategis Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Bupati Blitar Nomor 188 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Kinerja Pemerintah Kabupaten Blitar;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 92 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 115 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar;
13. Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Blitar Nomor 94 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Blitar.

D. Sistematika Dokumen

Kata Pengantar
Ikhtisar Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Tabel
Daftar Gambar
BAB I PENDAHULUAN
- A. Penjelasan Umum Organisasi
- B. Aspek Strategis Organisasi
- C. Dasar Hukum
- D. Sistematika

BAB II PERENCANAAN KINERJA
- A. Visi dan Misi
- B. Tujuan dan Sasaran
- C. Indikator Kinerja Utama
- D. Perjanjian Kinerja
- E. Perencanaan Anggaran

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Pengukuran Kinerja

B. Capaian Kinerja Organisasi

1. Menjelaskan definisi operasional dari setiap indikator kinerja;
2. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
4. Membandingkan realisasi kinerja tampil dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
5. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
6. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
7. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
8. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

C. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

B. Pemecahan Masalah

C. Tindak Lanjut

LAMPIRAN

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

A. Visi dan Misi

Pemerintah Kabupaten Blitar memiliki Visi "Terwujudnya Kabupaten Blitar yang Mandiri dan Sejahtera Berlandaskan Akhlak Mulia (*Baldatun, Thoyyibatun, wa Robbun Ghofur*". Visi tersebut tertuang dalam dokumen RPJMD Tahun 2021 – 2026. Dalam dokumen perencanaan 5 tahunan tersebut termuat misi yang harus dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi yang berkenaan dengan tugas dan fungsi dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar adalah mengacu pada Misi ke-3 *"Pengoptimalan Kinerja Pemerintah yang Akuntabel, Inovatif dan Berintegritas"* serta Misi ke-4 yaitu *"Percepatan dan pemerataan pembangunan yang adil dan merata melalui pembangunan pusat ekonomi daerah dengan mengedepankan pemberdayaan masyarakat dan kelestarian lingkungan."*

B. Tujuan dan Sasaran

Dengan memperhatikan permasalahan dan isu strategis serta memperhatikan misi Kabupaten Blitar, maka dirumuskan tujuan dan sasaran dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar. Tujuan dan Sasaran merupakan penjabaran/implementasi dari pernyataan misi. Dengan adanya tujuan akan memberikan arah yang lebih jelas untuk mencapai sasaran yang dituju.

Mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Dinas Perindustrian dan Perdagangan dalam mendukung Visi Misi ke-3 dan ke-4 Pemerintah Kabupaten Blitar, maka tujuan dan sasaran beserta indikator kinerja yang akan dicapai dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

MISI	Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Blitar		1. Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor
		2. Pertumbuhan PDRB industri pengolahan

MISI	Meningkatkan Keberdayaan Masyarakat dan Usaha Ekonomi Masyarakat yang Memiliki Daya Saing	
TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN / SASARAN
Unggulan Daerah	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP
	2. Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)
	3. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	Pertumbuhan Industri
		Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
1	Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah				
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	1.Nilai dan Predikat SAKIP	Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan system yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja instansi pemerintah, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik.	Laporan Hasil Evaluasi (LHE) SAKIP	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	2.PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda	Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan indikator ekonomi yang mengukur nilai total dari semua barang dan jasa	BPS Kab. Blitar	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Definisi Operasional Indikator	Sumber Data	Penanggung Jawab
		Motor (ADHK) (dalam Miliar Rupiah)	yang dihasilkan suatu wilayah; daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. PDRB bisa digunakan dalam mengukur kontribusi ekonomi suatu wilayah; daerah terhadap ekonomi nasional. (Miliar Rupiah)		
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	3.Pertumbuhan Industri	Industri pengolahan adalah sektor ekonomi yang terkait dengan proses transformasi bahan mentah menjadi produk jadi melalui berbagai tahapan produksi, dengan menggunakan mesin, peralatan, dan teknologi tertentu untuk menghasilkan barang bernilai tambah lebih tinggi.	Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		4.Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	Nilai investasi adalah jumlah uang atau aset lainnya yang dialokasikan atau diinvestasikan dalam suatu proyek, aset, atau instrumen investasi dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan.	Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan

D. Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026 maka ditetapkan sasaran yang perlu dicapai dan direalisasikan pada setiap tahunnya. Berikut Perjanjian Kinerja tahun 2024 yang memuat sasaran beserta indikator dan target kinerja.

Tabel 2.3
Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	71,88
2.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	9.733 Miliar Rupiah
3.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	5,56%
		b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	17,22%

E. Perencanaan Anggaran Tahun 2024

Untuk mewujudkan visi misi dan mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2024, maka dialokasikan anggaran sebesar Rp.10.921.086.290,- Namun untuk menyesuaikan dinamika dan situasi kondisi pencapaian target kinerja, maka anggaran yang telah tersedia dilakukan perubahan dan refocusing. Oleh Karena itu, alokasi anggaran tahun 2024 menjadi sebesar Rp.11.938.588.600,- dengan rincian sebagaimana Tabel 2.4.

Tabel 2.4
Rincian Anggaran Pada Tahun 2024

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	8.366.800.344	7.766.303.153
1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.883.284	9.883.284
a	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.971.642	7.971.642
b	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.911.642	1.911.642
2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.083.881.292	4.401.383.600
a	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	5.037.815.292	4.405.317.600
b	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	38.220.000	38.220.000
c	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.816.000	7.816.000
3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.700.000	22.700.000
a	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	22.700.000	22.700.000
4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	287.316.963	282.064.313

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
a	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.204.460	2.204.460
b	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	32.270.097	24.417.447
c	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.205.792	2.205.792
d	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.051.300	2.051.300
e	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.804.290	16.804.290
f	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200.951.024	203.951.024
g	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	450.000	450.000
3.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.832.729.000	2.899.072.491
a	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	302.165.200	268.508.691
b	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.530.563.800	2.630.563.800
6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.120.308	131.229.463
a	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	42.635.000	28.673.000
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	101.611.728	61.836.100
c	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	20.300.000	16.146.788
d	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.573.577	24.573.577
II	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	2.000.000	2.000.000
1.	Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Berantai	4.000.000	4.000.000
a	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Berantai melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.000.000	4.000.000
2.	Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Peredaran Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	4.000.000	4.000.000
a	Pengawasan Distribusi, Pengemasan dan Peredaran Bahan Berbahaya terhadap Pengguna Akhir Bahan Berbahaya (PA-B2) menguna Prekursor B2 (P-B2)	4.000.000	4.000.000
III	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	885.000.000	1.915.884.252
1	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	886.180.000	1.889.414.252
a	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	655.613.200	1.565.868.362
b	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	200.566.800	323.545.890

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
2.	Pembinaan terhadap Pengelola Barang Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	26.820.000	26.470.000
a	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Barang Distribusi Perdagangan	26.820.000	26.470.000
IV	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	66.991.820	77.891.820
1.	Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	50.876.820	62.216.820
a	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	18.947.300	27.087.300
b	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berkompak Dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota	31.929.520	35.129.520
2.	Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	15.675.000	15.675.000
a	Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	15.675.000	15.675.000
V	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	394.820.780	290.011.580
1.	Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	394.820.780	290.011.580
a	Pameran Dagang Nasional	91.798.280	93.908.280
b	Pameran Dagang Lokal	160.503.600	78.879.400
c	Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	37.731.600	42.820.000
d	Peningkatan Citra Produk Ekspor	104.827.400	77.403.900
VI	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	183.725.448	139.278.395
1.	Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	183.725.448	139.278.395
a	Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	108.628.948	90.396.948
b	Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	45.096.500	29.681.447
VII	PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	72.187.400	68.907.400
1	Pelaksanaan Promosi Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	72.187.400	68.907.400
a	Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	72.187.400	68.907.400
VIII	PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	920.000.000	1.233.112.000
1.	Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	920.000.000	1.233.112.000
a	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	75.000.000	273.430.000
b	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	845.000.000	959.682.000

No.	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Anggaran Perubahan (Rp)
IX	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/ KOTA	10.000.000	15.200.000
1.	Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	10.000.000	15.200.000
a.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	5.000.000	5.000.000
b	Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)	5.000.000	5.200.000
X	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.000.000	15.000.000
1.	Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	15.000.000
a.	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15.000.000	15.000.000
	TOTAL ANGGARAN	10.921.086.292	11.823.088.600

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Pengukuran kinerja merupakan fondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja. Pengukuran indikator kinerja sasaran dilaksanakan dalam rangka menjamin adanya peningkatan akuntabilitas kinerja dengan melakukan identifikasi outcome yang akan dan seharusnya dicapai untuk mewujudkan terwujudnya organisasi yang akuntabel.

Pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang direncanakan dan diperjanjikan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap seluruh indikator kinerja sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Terhadap adanya celah kinerja (*performance gap*) dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

A. Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dan target yang ditetapkan. Selanjutnya dikelompokkan dalam nilai dan predikat kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1

Pengelompokan Nilai dan Predikat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kategori
1.	91% s 100%	Sangat Tinggi
2.	76% s 90%	Tinggi
3.	66% s 75%	Sedang
4.	51% s 65%	Rendah
5.	s 50%	Sangat Rendah

Hasil pengukuran kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar atas Perjanjian Kinerja Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Hasil Pengukuran Kinerja

No.	Sasaran	Indikator Sasaran	Rata-rata Capaian Kinerja	Predikat Kinerja
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	100,80%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	99,42%	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya Kinerja Bidang Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	162%	
		b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	215%	
		Rata-rata	188,5%	Sangat Tinggi

B. Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diatas maka perlu dilakukan analisis untuk mengetahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program/kegiatan. Selain itu analisis capaian kinerja digunakan untuk mengetahui langkah-langkah perbaikan yang perlu dilakukan sebagai masukan dalam perencanaan dan pelaksanaan program/kegiatan pada masa yang akan datang. Berikut analisis capaian kinerja pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024.

1. **Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah**

Sasaran strategis Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah yang tercermin dari capaian dan nilai SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 dapat diperoleh nilai capaian kinerja sebesar 100,80%. SAKIP adalah singkatan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Ini merupakan sebuah sistem yang digunakan di Indonesia untuk mengukur dan memantau kinerja instansi pemerintah, serta untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publikBerikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

Tabel 3.5
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	71/BB	71,60/BB	100,80

Dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah diukur tingkat keberhasilannya melalui 1 (satu) indikator, yaitu Nilai dan Predikat SAKIP Perangkat Daerah. Nilai yang dimaksud disini adalah nilai yang diperoleh dari penilaian berdasarkan definisi operasional Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yaitu rystem yang digunakan untuk mengukur dan memantau kinerja instansi pemerintah, serta memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam penggunaan sumber daya publik. Penilaian/ evaluasi dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah yang dituangkan dalam Laporan Hasil Evaluasi (LHE). Peningkatan capaian kinerja Nilai SAKIP diperoleh dengan membandingkan atau membagi nilai SAKIP tahun 2024 dengan Nilai SAKIP tahun 2023, jika hasilnya lebih dari 1 atau di atas 100% maka termasuk meningkat.

Ruang lingkup evaluasi SAKIP yang dilakukan mencakup 1) Penilaian terhadap kualitas perencanaan kinerja yang selaras, akan dicapai untuk mewujudkan hasil berkesinambungan; 2) Penilaian terhadap pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan yang telah menjadi kebutuhan dalam penyusunan strategi dalam mencapai kinerja; 3) Penilaian pelaporan kinerja yang menggambarkan kualitas atau pencapaian kinerja, baik keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya yang perlu dilakukan dengan penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja yang akan datang; 4) Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang memberikan kesan nyata (tampak) dalam peningkatan implementasi SAKIP untuk efektifitas dan efisiensi kinerja.

Berdasarkan Tabel 3.2 diatas, indicator nilai dan predikat SAKIP Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 mendapat nilai 71,6 dengan predikat BB, melebihi nilai yang ditargetkan yaitu 71 (BB), sehingga persentase realisasi capaian kinerja sasaran ini adalah 100,8%. Realisasi kinerja ini menunjukkan peningkatan dibanding tahun 2023 dan 2022. Hal ini disebabkan Dinas

Perindustrian dan Perdagangan senantiasa berupaya melakukan perbaikan kinerja, termasuk dari sisi akuntabilitas, baik pada tahapan perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi internal. Capaian pada tahun 2024 ini tidak lepas dari beberapa catatan yang perlu ditingkatkan mengingat tuntutan berkinerja secara akuntabel juga semakin tinggi. Nilai dan predikat SAKIP berasal dari Laporan Hasil Evaluasi AKIP atas self assessment yang dilakukan oleh perangkat daerah. Formula yang digunakan untuk mengukur peningkatan akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah membandingkan capaian dengan target yang ditetapkan yaitu:

= [Capaian Nilai SAKIP / Target Nilai SAKIP] x 100%

Berikut perbandingan capaian akuntabilitas kinerja dari tahun 2022 sampai dengan 2024:

Tabel 5.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2024
dengan Tahun-Tahun Sebelumnya

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	70,18/BB	63,99/B	71,60/BB

Capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian tahun ketiga dari periode Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Meskipun mengalami peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun capaian kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah pada tahun 2024 tercapai 89,50% dari target jangka menengah, hal ini disebabkan adanya faktor penghambat yaitu standar evaluasi SAKIP yang digunakan berbeda dengan saat target Renstra ditetapkan sebagaimana telah disampaikan sebelumnya. Berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 3.5
Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Terhadap Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	80/A	71,60/BB	89,50%

Berdasarkan tabel di atas apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur dalam hal ini adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur, maka capaian kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tercatat lebih rendah. Hal ini memungkinkan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti perencanaan, pengukuran dan pelaporan kinerja yang kurang optimal, serta pendampingan yang lebih intensif dari Bappeda Provinsi Jawa Timur terhadap Perangkat Daerah dalam proses penetapan indikator maupun target kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.6
Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Realisasi Provinsi Tahun 2024
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	71,60/BB	93,67/AA

Dalam mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya guna mengungkit pencapaian kinerja yang diharapkan, diantaranya adalah :

a. Capaian kinerja atau rencana aksi dipantau secara berkala setiap bulan, Laporan Kinerja Triwulanan Tahun 2025 telah disusun sesuai Peraturan Bupati Nomor 126 Tahun 2024.
b. LKjIP telah menyajikan informasi tentang perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.

c. Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Aplikasi SIYAKIH

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut belum sepenuhnya dapat diatasi sehingga realisasi kinerja belum dapat terealisasi secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah adalah sebagai berikut:

a. Kurangnya dukungan SDM baik dari segi jumlah maupun kompetensinya dalam mendukung pencapaian kinerja urusan perindustrian dan perdagangan;
b. Belum tersedia Aplikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah. Solusi untuk mengatasi kendala tersebut adalah dengan:

a. Berusaha memenuhi kebutuhan SDM sesuai pola jabatan baik melalui pengusulan formasi dalam rekrutmen CPNS maupun PPPK.
b. Akan menggunakan Aplikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal perangkat daerah apabila telah tersedia.

Realisasi kinerja sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah beserta kegiatan-kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah adalah sebesar Rp.7.766.909.168,00 dengan realisasi sebesar Rp.7.513.882.028,00. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah:

Tabel 3.7
Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Alokasi	Realisasi	%
1	Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	100,00%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	7.766.303.183	7.513.882.023	96,74
			Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	9.882.284	9.610.800	97,24
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	7.971.642	7.839.400	98,29
			Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	1.911.642	1.770.400	92,61
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.401.353.6 00	4.202.370.702	96,20
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.405.317.6 00	4.297.084.702	96,18
			Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	38.220.000	38.220.000	100,00
			Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	7.216.000	7.066.000	97,92
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	22.700.000	10.306.500	45,40
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	22.700.000	10.306.500	45,40

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Alokasi	Realisasi	%
			Pelaksanaan Tugas dan Fungsi			
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	202.264.213	247.898.292	96,20
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2.204.460	2.204.460	100,00
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	24.417.447	24.385.743	99,87
			Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	2.205.790	2.205.790	100,00
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	2.031.300	1.990.674	98,00
			Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	16.804.290	16.380.000	97,48
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	203.931.024	200.731.893	98,43
			Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	400.000	-	0,00
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.899.072.491	2.834.016.306	97,76
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	268.508.891	241.063.334	89,78

No	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)		
				Alokasi	Realisasi	%
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	2.630.363.000	2.592.902.972	98,57
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	131.229.468	128.879.127	98,06
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	38.673.000	38.378.440	98,96
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	91.836.100	89.897.300	98,88
			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16.148.788	15.919.300	98,59
			Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	24.573.577	24.486.885	99,65
			Realisasi Anggaran	7.766.303.133	7.312.882.023	96,74
			Tingkat Efisiensi			96,82%

Rumus Efisiensi Sumber Daya:

$$E = \sum ([PAKI \times CKI) - RAKI) / \sum (PAKI \times CKI)) \times 100\%$$

Keterangan : E : Efisiensi

PAKI : Pagu Anggaran Kelurahan i

RAKI : Realisasi Anggaran Kelurahan i

CKI : Capaian Kelurahan i

- *Efisien : Persentase efisiensi di atas 90% (menunjukkan bahwa pencapaian anggaran hampir mendekati atau mencapai target yang direncanakan dengan baik.*
- *Cukup Efisien : Persentase efisiensi antara 70%-90% (meskipun ada sedikit perbedaan antara pencapaian actual dan target namun secara keseluruhan masih dianggap cukup efisien)*
- *Kurang Efisien : Persentase efisiensi di bawah 70% (ada kesenjangan yang signifikan antara pencapaian actual dan target yang direncanakan, sehingga menandakan ketidakefisienan dalam penggunaan anggaran)*

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah. Capaian realisasi kinerja diperoleh sebesar 100,80% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 96,74%, sehingga efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran tersebut adalah sebesar 96,83% (efisien), yang menunjukkan bahwa dengan sumber daya yang ada dan serapan 96,74% dapat memberikan kontribusi lebih dari target yang ditetapkan. Ketercapaian tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan sumber daya telah selaras dengan upaya perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi yang dilakukan.

2. Sasaran Strategis Kedua : Meningkatnya Kinerja Perdagangan

Dalam sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan, indikator yang digunakan adalah PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Motil dan Sepeda Motor (ADHK). Definisi operasional Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah indikator ekonomi yang mengukur nilai total dari semua barang dan jasa yang dihasilkan suatu wilayah/

daerah dalam jangka waktu tertentu, biasanya dalam satu tahun. PDRB biasa digunakan dalam mengukur kontribusi ekonomi suatu wilayah/ daerah terhadap ekonomi nasional (Miliar Rupiah), yang perhitungannya dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Adapun PDRB Perdagangan Besar; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor merupakan salah satu lapangan usaha penyusun ekonomi daerah yang kinerjanya direpresentasikan dalam nilai PDRB Perdagangan Besar; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK). Untuk mengetahui peningkatan kinerja perdagangan dihitung dengan rumus :

- **(PDRB tahun n – PDRB (tahun n-1) / PDRB (tahun n-1)) x 100%**

PDRB Perdagangan Besar; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Kabupaten Bitar yang merepresentasikan kinerja perdagangan di Kabupaten Bitar, pada tahun 2024 terealisasi sebesar Rp. 5.699,73 M, lebih rendah dari target yang ditetapkan yaitu sebesar Rp. 5.732 M (Tingkat capaian 99,42%; termasuk kategori **sangat tinggi**. Berikut tabel pertandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan.

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Sasaran Strategis
Meningkatnya Kinerja Perdagangan Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	5.732 Miliar Rupiah	5.699,73 Miliar Rupiah	99,42
Tingkat Capaian Kinerja					99,42

PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor menggambarkan nilai tambah dari aktivitas perdagangan besar, eceran, dan reparasi mobil serta sepeda motor dalam suatu wilayah atau daerah.

PDRB Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil Dan Sepeda Motor dapat memberikan informasi yang berguna untuk :

1. Menganalisis struktur ekonomi suatu daerah,
2. Mengidentifikasi potensi dan kelemahan ekonomi suatu daerah,

3. Membuat kebijakan ekonomi yang tepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Berdasarkan Tabel 3.2 di atas, indikator PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) pada tahun 2024 adalah sebesar Rp. 5.699,79 Miliar dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 5.733 M sehingga kinerja yang dicapai adalah 99,42% (dibawah target yang ditetapkan). Realita ini lebih disebabkan oleh menurunnya produktivitas tanaman pertanian yang disebabkan oleh el-Nino serta perubahan iklim yang sulit diprediksi sehingga sangat mempengaruhi menurunnya produktivitas tanaman pertanian serta kenaikan harganya di pasaran. Mengingat pada tahun 2024 kontribusi PDRB Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan terhadap PDRB Kabupaten Bitar secara keseluruhan masih bertahan di peringkat pertama yaitu sebesar 29,66%, maka menurunnya produktivitas tanaman pangan tersebut relative berpengaruh pada menurunnya daya beli dan aktivitas ekonomi local di pasar-pasar tradisional dan pertokoan, serta meningkatnya biaya bahan baku industri.

Meskipun tidak memenuhi target, namun realisasi kinerja setaran ke-2 pada tahun 2024 masih menceritakan pertumbuhan meski mengalami perlambatan jika dibandingkan tahun 2023 dan 2022. Berdasarkan data yang ada PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Motil dan Sepeda Motor (ADHK) di Kabupaten Bitar pada tahun 2022-2024 terus mengalami pertumbuhan yang melambat dimana tahun 2024 kinerja ekonomi dari sektor perdagangan tumbuh melambat 5,52% jika dibandingkan dengan capaian tahun 2023. Kinerja ekonomi tahun 2023 mengalami perlambatan pertumbuhan sebesar 6,1% dibanding laju pertumbuhan tahun 2022 yang tercatat sebesar 6,69%.

Berikut perbandingan capaian kinerja setaran ke-2 dari tahun 2022 – 2024.

Tabel 2.9 Perbandingan Kinerja Sasaran

Meningkatnya Kinerja Perdagangan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	5.091,2 Miliar Rupiah	5.401,5 Miliar Rupiah	5.699,73 Miliar Rupiah

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 menjadi capaian tahun kedua dari periode Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026. Berdasarkan Tabel 2.9, pada tahun 2024 peningkatan kinerja perdagangan telah mencapai 94,95% dari target akhir periode Renstra (2026), atau sebesar Rp.5.699,73M dari Rp.6.003,63M yang ditargetkan. Faktor pendorong relatif tingginya pencapaian tersebut tidak lepas dari kontribusi berbagai pihak, baik dari pemerintahan maupun stakeholder pada sektor perdagangan dan sektor-sektor lain yang terkait di Kabupaten Blitar. Pemerintah selalu berupaya maksimal untuk memberikan dampak positif terhadap aktivitas perdagangan di Kabupaten Blitar dengan melaksanakan berbagai program kegiatan baik berupa fasilitasi pemenuhan dokumen perijinan perdagangan, peningkatan sarana perdagangan, pengendalian inflasi, peningkatan ekspor, dukungan peningkatan penggunaan produk dalam negeri, serta perlindungan konsumen. Berikut perbandingan capaian kinerja tahun 2024 terhadap target jangka menangah Renstra :

Tabel 2.10

Pencapaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan terhadap target jangka menangah Renstra

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	6.003,63 Miliar Rupiah	5.699,73 Miliar Rupiah	94,95%

PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Kabupaten Blitar merupakan penyusun PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Provinsi Jawa Timur. Apabila laju pertumbuhan serta kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Blitar dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Timur dan Nasional, maka capaian Kabupaten Blitar pada sektor ini lebih tinggi. Laju pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK) Kabupaten Blitar adalah 5,52%, sedangkan Jatim 4,54% dan Nasional 4,86%. Demikian juga Kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Kabupaten Blitar (ADHB) adalah sebesar 19,27% terhadap total PDRB Kabupaten Blitar, capaian ini **lebih besar** daripada kontribusi PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Jatim terhadap PDRB Jatim yaitu 18,81%, serta **lebih besar** juga dari Kontribusi PDB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor Nasional sebesar 18,01% dari total PDB Nasional. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blitar termasuk Dinas Perindustrian dan Perdagangan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja sasaran meningkatnya kinerja perdagangan di Kabupaten Blitar. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur dan Nasional pada tahun 2024.

Tabel 3.11
Perbandingan Capaian Kinerja di Tingkat Provinsi
Jawa Timur dan Nasional

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024		
			Kab. Blitar	Jatim	Nasional
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	5.699,73 Milyar Rupiah	368,85 Triliun Rupiah	1.682.054 Milyar Rupiah (PDB)
		Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	5,52	4,54	4,86
		Persentase kontribusi sub sektor Perdagangan	19,27	18,81	13,07

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi 2024		
			Kab. Blitar	Jatim	Nasional
		Sektor dan Ekspor: Reparasi Mobil dan Sepeda Motor terhadap PDRB *) Ket.: PDB sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)			

Untuk mencapai target kinerja diatas, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2024 telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan, diantaranya adalah dengan adanya Inovasi Audisi dan Inkubasi Ekspor (AIDI EKSPOR) sebagai fasilitasi kepada pelaku usaha untuk memperluas jangkauan pemasarannya hingga ke mancanegara dengan produk-produk yang berkualitas dan diminati pasar global.

Dari Upaya-upaya yang dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Beberapa kendala dan hambatan tersebut belum dapat diatasi, namun demikian tidak terlalu mempengaruhi realisasi kinerja sasaran. Meskipun tidak mencapai target yang ditetapkan, realisasi kinerja sasaran masih menunjukkan pertumbuhan. Kendala dan hambatan yang dihadapi pada urusan perdagangan adalah sebagai berikut :

a. Menurunnya nilai ekspor dari Kabupaten Blitar karena menurunnya permintaan produk dari luar negeri akibat adanya penurunan daya beli *buyer* serta persaingan harga dengan produk local. Munculnya kompetitor baru produk Kandang Jinbe di negara tujuan ekspor (Cina) saat ini telah berhasil memproduksi sendiri kandang berbahan dasar PVC dengan harga yang jauh lebih murah.
b. Penurunan jumlah alat UTTP yang dilayani tera/tera ulang disebabkan beberapa faktor baik internal (menurunnya jumlah hari cidang) maupun eksternal (perubahan regulasi, menurunnya jumlah potensi UTTP.
c. Pemungutan retribusi yang diterapkan belum sesuai dengan tarif yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Hal ini diantaranya karena belum diterapkannya e-retribusi secara maksimal.

d. Masih banyaknya fasilitas pasar yang belum memadai.

e. Belum tersedianya system berbasis elektronik sebagai sarana menghimpun data teknis dari para pelaku usaha secara lengkap dan tepat waktu untuk akurasi perancangan pembangunan di bidang perindustrian dan perdagangan;

f. Penguasaan teknologi dan jaringan para pelaku usaha perdagangan ekspor dari Kabupaten Bitar mayoritas belum sesuai dengan tuntutan pasar global, sehingga masih bergantung pada eksportir dari daerah-daerah sekitarnya (supplier atau under name).

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rancana tindak lanjut untuk merujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan. Berikut alternatif solusi sebagai rancana tindak lanjut berdasarkan analisis capaian kinerja:

a. Meningkatkan daya saing produk layak ekspor dari Kabupaten Bitar dengan pelatihan-pelatihan peningkatan mutu dan kemasan produk yang modern, kurasi produk secara periodic, melanjutkan Adi Ekspor yang terevaluasi, fasilitasi pendaftaran merek dagang, sertifikasi halal dan mensupport legalisasi hak paten terhadap produk asli temuan/inovasi anak bangsa agar tidak mudah dipiagiasi/ditajak.

b. Tetap melakukan sosialisasi tentang pentingnya tertib ukur terhadap alat UTTP serta menyesuaikan jumlah potensi UTTP daerah sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

c. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Bitar Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pedagang pasar, pengelola pasar dan pemungut retribusi pasar.

d. Revitalisasi pasar rakyat kabupaten sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta pusat aktivitas ekonomi, yang akan terus berbenah dan berinovasi untuk mengambil ceruk bisnis sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.

e. Mendorong upaya penerapan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;

f. Memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha pada event-event promosi, temu usaha/temu bisnis untuk meningkatkan pengalaman, peluang dan relationship.

Realisasi kinerja diatas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program/kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan adalah sebesar Rp.2.695.973.447 dengan realisasi sebesar Rp.2.447.746.082 (tingkat capaian 98,07%) Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan.

Tabel 3.12

Realisasi Anggaran Dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan

No	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)		%
				Alokasi	Realisasi	
1	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	98,40%	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	8.000.000	8.000.000	100,00
			Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan	4.000.000	4.000.000	100,00
			Fasilitasi Pemanfaatan Kemitraan Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	4.000.000	4.000.000	100,00
			Pengendalian Fasilitasi Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Penyimpanan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	4.000.000	4.000.000	100,00
			Pengawasan Distribusi, Penyimpanan dan Pelabelan Bahan	4.000.000	4.000.000	100,00

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)		%
				Alokasi	Realisasi	
			Berbahaya terhadap Penggunaan Akhir Bukan Berbahaya (N-B2) maupun Terbatas B2 (T-B2)			
			PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	1.915.894.252	1.877.421.224	97,99
			Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.888.414.252	1.854.208.224	98,14
			Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	1.363.888.252	1.332.194.484	97,68
			Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	324.545.690	322.161.880	99,27
			Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	26.470.000	23.065.000	87,14
			Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	26.470.000	23.065.000	87,14
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	77.891.820	77.710.000	99,77
			Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	62.216.820	62.035.000	99,71
			Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting Pada Pasar Rakyat Yang Terintegrasi Dalam Sistem Informasi Perdagangan	27.087.800	26.975.000	99,58

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)		%
				Alokasi	Realisasi	
			Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus Yang Berlangsung Dalam 1 (satu) Kabupaten/ Kota	38.139.520	38.060.000	99,80
			Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	13.675.000	13.675.000	100,00
			Pengawasan Penyaluran dan Penggunaan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi	13.675.000	13.675.000	100,00
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	290.011.580	283.134.875	97,63
			Penyelenggaraan Promosi dan Iklan Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan Yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	290.011.580	283.134.875	97,63
			Pameran Dagang Nasional	93.908.280	91.978.280	97,94
			Pameran Dagang Lokal	75.879.400	73.332.400	96,64
			Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan	42.820.000	42.814.037	99,99
			Peningkatan Citra Produk Ekspor	77.403.900	75.010.158	96,91
			PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	154.278.395	154.394.825	99,55
			Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	154.278.395	154.394.825	99,55
			Pelaksanaan Metrologi Legal berupa Tera, Tera Ulang	95.596.948	95.367.825	99,76
			Pengawasan / Penyuluhan Metrologi Legal	58.681.447	59.027.000	98,55

No.	Sasaran	Capaian kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran (Rp.)		%
				Alokasi	Realisasi	
			PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	68.907.400	67.085.000	97,36
			Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	68.907.400	67.085.000	97,36
			Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/ Kota	68.907.400	67.085.000	97,36
			Realisasi Anggaran	2.498.973.447	2.447.746.032	98,07
			Tingkat efisiensi			99,01%

Rumus Efisiensi Sumber Daya:

$$E = \sum ((RAKi \times CKi) - RAKi) / \sum (RAKi \times CKi)) \times 100\%$$

Keterangan : E : Efisiensi

RAKi : Pagu Anggaran Keluaran i

RAKi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kinerja Perdagangan

Pagu anggaran dalam upaya mewujudkan target indikator sasaran ini adalah Rp.2.498.973.447,- Capaian realisasi kinerja adalah 99,42% sedangkan realisasi anggaran sebesar Rp.2.447.746.032,- (98,97%). Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran meningkatnya Kinerja Perdagangan adalah sebesar 99,01% **(efisien)**.

Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Perdagangan tidak lepas dari dukungan Program/Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Uraian terkait Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan
   Program ini didukung oleh 2 kegiatan sebagai berikut:
   a. Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan;
   b. Pengendalian Fasilitas Penyimpanan Bahan Berbahaya dan Pengawasan Distribusi, Pengelolaan dan Pelabelan Bahan Berbahaya di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Pagu anggaran sebesar Rp.7.796.808.188,- dan terealisasi sebesar Rp. 7.512.882.028,- atau 96,74%.

   Analisis Program/Kegiatan Pada Tahun 2024:
   Indikator kinerja program ini adalah persentase rekomendasi izin yang dikeluarkan terhadap jumlah permohonan yang masuk. Pada tahun 2024 terealisasi sesuai yang telah direncanakan sebesar 100%, dimana jumlah rekomendasi teknis yang dikeluarkan berjumlah 9 rekomendasi dari 9 permohonan yang masuk. Dari 9 rekomendasi teknis yang telah diterbitkan tersebut, 2 (dua) rekomendasi adalah Perizinan Tanda Daftar Gudang (TDG) dan 7 (tujuh) rekomendasi untuk Perizinan Toko Swalayan. Secara umum kegiatan/sub kegiatan pada program ini telah terealisasi dengan baik.

2. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :
   a. Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan
   b. Pembinaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya

   Pagu anggaran program sebesar Rp. 1.915.884.252,- dan terealisasi sebesar Rp 1.877.421.334,- atau 97,99%.

Analisis Program/Kegiatan Pada Tahun 2024:

Indikator program ini adalah tingkat pengantengan dan pengadaan karena distribusi perdagangan. Capaian realisasi mencapai 100%, yang berarti seluruh target kegiatan berhasil direalisasikan. Pencapaian ini terlihat melampaui target yang ditetapkan, yaitu sebesar 92%, sehingga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Sedangkan secara realisasi anggaran dimana penyerapan sebesar 97,99%. Secara umum kegiatan/sub kegiatan pada program ini telah terealisasi dengan baik.

8. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, didukung oleh 2 (dua) kegiatan, yaitu :
   a. Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota
   b. Pengawasan Pupuk dan Pestisida Bersubsidi di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

   Pagu anggaran program sebesar Rp. 77.291.820,- dan terealisasi sebesar Rp. 77.710.000,-atau 99,77%.

   Analisis Program/Kegiatan Pada Tahun 2024

   Indikator program ini adalah tingkat stabilitas harga dan ketersediaan barang kebutuhan pokok dan barang penting. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 69%. meskipun realisasi tidak terlalu jauh namun menunjukkan bahwa program berjalan cukup efektif, setidaknya dalam memenuhi target yang ditetapkan. Sedangkan secara realisasi anggaran dimana penyerapan sebesar 99,77%. Secara umum kegiatan/sub kegiatan pada program ini telah terealisasi dengan baik.

9. Program Pengembangan Ekspor, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :
   a. Penyelenggaraan Promosi dan Misi Dagang Bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat Pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota, dengan Pagu anggaran program sebesar Rp. 290.011.580,- dan terealisasi sebesar Rp. 283.134.870,- atau 97,63%.

   Analisis Program/Kegiatan Pada Tahun 2024

Indikator program ini adalah persentase pertumbuhan nilai ekspor perdagangan. Realisasi capaian program sebesar -36,08%, jauh kurang dari target yang ditetapkan sebesar 9,27%, sedangkan realisasi anggaran tercapai optimal sebesar 97,63%. Hal ini mengindikasikan adanya faktor yang memengaruhi performa perdagangan luar negeri, termasuk kemungkinan penurunan permintaan produk dari luar negeri akibat adanya penurunan daya beli buyer dan juga persaingan harga dengan produk lokal negara tujuan, seperti produk kandang yang diekspor ke Negara China. Secara umum kegiatan/sub kegiatan pada program ini telah terealisasi dengan baik.

5. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :
   a. Pelaksanaan Metrologi Legal Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan, dengan Pagu anggaran program sebesar Rp. 135.278.895,- dan terealisasi sebesar Rp. 134.894.825,- atau 99,83%.

Analisis Program/Kegiatan Pada Tahun 2024:
Indikator program ini adalah persentase peningkatan jumlah UTTP yang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Realisasi capaian program sebesar 8,89%, kurang dari target yang ditetapkan sebesar 20,96%. Adapun dengan realisasi anggaran sebesar 99,83%, secara umum pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan pada program ini telah terealisasi dengan baik.

6. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri, didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu :
   a. Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri, dengan Pagu anggaran program sebesar Rp. 68.907.400,-dan terealisasi sebesar Rp. 67.085.000,- atau 97,36%.

Analisis Program/Kegiatan pada Tahun 2024:
Indikator program ini adalah persentase serapan produk dalam negeri di tingkat kabupaten. Pada tahun 2024 terealisasi sebesar

88,13% melampaui target yang ditetapkan sebesar 87%. Sedangkan secara realisasi anggaran dimana penyerapan sebesar 97,86%. Secara umum kegiatan/sub kegiatan pada program ini telah terealisasi dengan baik.

Berikut disajikan beberapa data kinerja pada urusan perdagangan sebagai pendukung pencapaian kinerja sasaran strategis tahun 2024 :

Tabel 2.13
Capaian Indikator Kinerja Kunci
atas Penyelenggaraan Urusan Perdagangan Tahun 2024

No	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target	Realisasi
1.	Pertumbuhan nilai ekspor non migas	%	-38,64	2,86	179,82	9,87	-36,09%
2.	Tertib Ukur	Komoditas	5	31	10	4	9
3.	Persentase Barang Beredar yang diawasi yang sesuai dengan ketentuan perundangan	%	n/a	93,27	95,88	95,88	96,33
4.	Persentase kinerja realisasi pupuk	%	62,32	93,27	95,88	95,88	96,33
5	Persentase komoditi potensial yang sesuai dengan ketentuan barista	%	n/a	66,80	66,67	78,47	75
6.	Persentase stabilitas dan jumlah ketersediaan harga barang kebutuhan pokok	%	62,32	66,67	66,67	66,67	66,67

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siak, 2025

Tabel 2.14
Upaya Revitalisasi/Pembangunan Pasar Rakyat
Kabupaten Siak Tahun 2024

No.	Pasar	Aksi
1	Pasar Sungai Pakil	Jasa Konsultansi Penyusunan SLF
		Pembuatan Final Power House Jaringan Listrik
2	Pasar Kedaungan	Jasa Konsultansi Perencanaan Revitalisasi
		Jasa Konsultansi Pengawasan Revitalisasi
		Revitalisasi Pasar
3	Pasar Gondumai	Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study
4	Pasar Dalu	Jasa Konsultansi Penyusunan Feasibility Study
5	Pasar Sungai	Biaya Pengembalian Tapal batas
		Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan
6	Pasar Pelagah	Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen UKL-UPL
		Jasa Konsultansi Penyusunan Dokumen Rotek dan

No.	Pasar	Aksi
		Pertain
		Jasa Konsultansi Penyusunan Amdalalin
		Jasa Konsultansi Perencanaan Pembangunan/Rehabilitasi (Pendamping Dana TP 2024)
		Jasa Konsultansi Pengawasan Pembangunan/Rehabilitasi (Pemotongan Lahan - Pendamping Dana TP 2024)
		Pengadaan Pompa Air
		Pembangunan/Rehabilitasi Pasar Sigagak (Pemotongan Lahan Pendamping Dana TP 2024)
7	Pasar Tulus	Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan
8	Pasar Lodaya	Jasa Konsultansi Penyusunan Master Plan
9	Pasar Kecamatan	Jasa Konsultansi Review DED

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2024

Tabel 0.15
Rekapitulasi Pelaksanaan Pasar Murah di Kabupaten Blitar
Tahun 2024

No	Tanggal	Tempat	Komoditi	Harga Rp		Jumlah		Keterangan
1	7 Maret 2024	Pasar Wlingi, Kec. Wlingi	Beras SPHP	12.400	/kg	5.000	kg	Khusus
			Minyakita	14.000	/l	1.000	l	
2	8 Maret 2024	Pasar Sidorejo, Kec. Panggungrejo	Beras SPHP	12.400	/kg	5.000	kg	Khusus
3	15 Maret 2024	Kantor Desa Pasirharjo, Kec. Talun	Beras SPHP	12.400	/kg	5.000	kg	Khusus
4	19 Maret 2024	Kiosk-Kiosk Kanoman, Kec. Kanigoro	Beras SPHP	12.400	/kg	5.000	kg	Khusus
5	20 Maret 2024	Lapangan Kec. Wonotirto, Kec. Wonotirto	Beras SPHP	12.400	/kg	5.000	kg	Khusus
6	27 Maret 2024	Kiosk-Kiosk Kanoman, Kec. Kanigoro	Beras SPHP	12.400	/kg	5.000	kg	Khusus
			Gula Pasir	16.000	/kg	250	kg	
			Minyakita	14.000	/l	800	l	
			Telur	27.000	/kg	100	pack	
7	3 April 2024	Lapangan Kedomangan, Kec. Kedomangan	Beras SPHP	12.400	/kg	5.000	kg	Khusus
8	4 April 2024	Kiosk-Kiosk Kanoman, Kec. Kanigoro	Beras SPHP	12.400	/kg	5.000	kg	Khusus
9	17-Sep-24	Kiosk-Kiosk Lodaya, Kec. Sukorejo	Beras SPHP	11.400	/kg	2.000	kg	Khusus
			Minyakita	13.800	/l	400	l	
10	17 Oktober 2024	Halaman Kantor Desa Penggon, Kecamatan Panggungrejo	Beras SPHP	12.400	/kg	2.000	kg	Khusus
			Gula Pasir	16.000	/kg	100	kg	
			Minyakita	14.000	/l	800	l	
			Telur	22.000	/pack	100	pack	
11	20 Oktober 2024	Halaman Kantor Desa Pagerwojo,	Beras SPHP	12.400	/kg	2.000	kg	Khusus
			Gula Pasir	16.000	/kg	100	kg	
			Minyakita	14.000	/l	800	l	

No	Tanggal	Tempat	Komoditi	Harga Rp		Jumlah		Keterangan
		Kecamatan Kesamben	Telur	22.000	/pack	100	pack	
13	15-Nov-24	Halaman Kantor Kecamatan Wlingi	Beras SPHP	11.400	/kg	2.000	kg	Reguler
			Gula Pasir	18.000	/kg	100	kg	
			Minyak premium	18.000	/l	800	l	
			Telur	22.000	/pack	500	pack	
13	29-Nov-24	Kantor Bupati, Kanigoro Blitar	Beras SPHP	11.400	/kg	2.000	kg	Reguler
			Gula Pasir	18.000	/kg	100	kg	
			Minyak premium	18.000	/l	800	l	
			Telur	22.000	/pack	100	pack	

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025

Tabel 3.16

Rekapitulasi Pelayanan Tera/Tera Ulang Alat UTTP Tahun 2024

No.	Jenis Pelayanan	Jumlah
1	Tera/Tera Ulang di Kantor	496 unit
2	Tera/Tera Ulang di tempat pelaku (LGKG)	929 unit
3	Bidang Tera/Tera Ulang Pasar	5.442 unit
	Jumlah	6.867 unit

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025

Tabel 3.17

Daftar Pelaku Usaha yang Bersiklasi dengan *Marketplace* dan E-Catalog Kabupaten Blitar Tahun 2024

No	Nama Usaha	Akun E-Catalog	Akun Tiktok Shop
1	PT. Gelnah Cahaya Abadi	omoru	omoru_bantuporong
2	LIBALIBI	LIBALIBI	tiktok.com/@libalibi_
3	Endah purwanti	Endah Catering	Ajihilmas
4	Yulen Jaya Makmur / Mesi Tilas	Mamiyulen	Mekarsangi.shop
5	ENI AGUSTIAH	Resik Sae	ENIAGHOPELTIAR
6	Bumdesma Gulang Sarang	Bumdesma Gulang Sarang	kopi.tuna.gulang
7	PT Mandan Raya Sumsa	PT Mandan Raya Sumsa	-
8	UMETA COLLECTION	Umeta kerik	UMETA collection
9	PT Ekonomi Coffee Esot Industri	Ekonomi Group	@ekonomicoffeeofficial
10	Depser Dessa	Depser Dessa	depserdessa26
11	D mentah	Dmentah catering	Dmn shop
12	Payang cokelat	Cokelat Payang	payang_cokelat
13	KabolGroup	KabolGroup	purgamur
14	ROWIPA AGRICEMA ADI	ADI	AGRICEMA ADI
15	Al Khanan	Depser Alkhanan	alkhanan_
16	UD. Fabula Sari Nira	Fabula Sari Nira	-
17	UD AA Jaya Bersama	UD AA Jaya Bersama	aajayabersama
18	Cv asmaniya group	asmaniya group	asmaniya_store
19	Yudo Chandrawa Wirausahawa	Wira Group	wira_innovindo
20	Depser Kasan	Depser Kasan	depserkasancatering

No	Nama Usaha	Akun E-Catalog	Akun Tiktok Shop
21	CV Gantung Emas	CV Gantung Emas	-
22	hello decta	Decta kurnia	hello decta4
23	AMODA ATHIK	AMODA ATHIK	amogamoni
24	Indah Wulandari	-	@indah_7304
25	Caroline@gmail.com	-	-
26	Rahmi Jaya k	-	KACAPIRIY SALITAR
27	PT. Natural Nusa Indonesia Mandiri	-	Nusaindoni21
28	Muzakar	-	muzakar.store
29	PT RUAH KARYA EKSPEDISI	-	-
30	Fahiana Yusuf	-	fahiana

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025

3. Sasaran Strategis: Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan

Dalam sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan, diperoleh nilai capaian kinerjanya sebesar 188,50%. Berikut tabel perbandingan capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan.

Tabel 2.18

Realisasi Kinerja Sasaran Strategis

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	2,56%	3,83%	162
		b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	17,33%	37,01%	215
Rata-Rata Capaian Kinerja					188,50

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025

Dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan diukur tingkat keberhasilannya dengan 2 indikator yang merupakan Indikator Kinerja Utama Kepala Perangkat Daerah. Indikator pertama adalah pertumbuhan industri yaitu persentase peningkatan jumlah industry pengolahan tahun 2024 dibandingkan dengan tahun 2023, dimana definisi industry pengolahan adalah sektor ekonomi yang terkait dengan proses transformasi bahan mentah menjadi produk jadi melalui berbagai tahapan produksi, dengan menggunakan mesin, peralatan, dan teknologi tertentu untuk menghasilkan barang bernilai tambah lebih tinggi. Adapun rumus yang digunakan adalah :

= [(Jumlah industry pengolahan tahun N – jumlah industry pengolahan tahun N-1)/ jumlah industry pengolahan tahun N-1] x 100%

Berdasarkan Tabel 3.13 di atas, pertumbuhan industry di Kabupaten Blitar yang tercermin dari peningkatan jumlah industry pengolahan tahun 2024 dibandingkan dengan jumlah industry tahun sebelumnya (2023), terealisasi sebesar 3,03% atau melampaui target yang ditetapkan yaitu 2,06% (tingkat capaian 162%, sangat tinggi).

Tabel 3.24

Perkembangan Industri Kecil Per Kecamatan

di Kabupaten Blitar Tahun 2021-2024

NO.	KECAMATAN	PERKEMBANGAN INDUSTRI TAHUN				KETERANGAN
		2021	2022	2023	2024	
1	Bakung	1,263	1,266	1,283	1,308	IKM
2	Binangun	328	660	674	684	IKM
3	Doko	427	629	633	673	IKM
4	Gandusari	1,380	1,413	1,427	1,536	IKM
5	Garum	1,139	1,303	1,393	1,401	IKM
6	Kademangan	1,146	1,190	1,264	1,341	IKM
7	Kanigoro	1,168	1,241	1,339	1,445	IKM
8	Kesamben	479	773	805	836	IKM
9	Nglegok	3,326	3,374	3,445	3,500	IKM
10	Panggungrejo	188	412	420	445	IKM
11	Penggok	2,958	3,011	3,046	3,111	IKM
12	Sanankulon	1,737	1,793	1,837	1,888	IKM
13	Selopuro	573	715	787	827	IKM
14	Selorejo	1,077	1,109	1,130	1,179	IKM
15	Srengat	1,014	1,064	1,112	1,187	IKM
16	Sutojayan	747	789	833	866	IKM
17	Talun	943	982	1,049	1,116	IKM
18	Udanawu	640	653	673	708	IKM
19	Wates	617	799	810	834	IKM
20	Wlingi	859	903	1,028	1,064	IKM
21	Wonodadi	430	492	478	501	IKM
22	Wonotirto	305	442	457	470	IKM
	JUMLAH	22,762	24,859	26,912	28,396	IKM

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025.

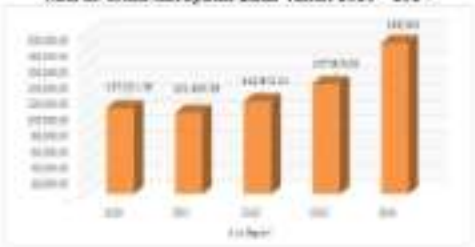
Indikator Kedua adalah peningkatan nilai investasi Industri Industri Pengolahan Non Migas yaitu persentase peningkatan nilai investasi industry pengolahan non migas yang ada di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 dibandingkan tahun 2023. Dimana definisi nilai investasi adalah jumlah uang atau aset lainnya yang diinvestasikan atau dipertaruhkan dalam suatu proyek, aset, atau instrument investasi

dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa depan. Nilai investasi Industri Industri Pengolahan Non Migas Kabupaten Blitar diperoleh dari laporan yang disajikan secara periodic pada Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas). Rumus yang digunakan adalah :

$$\% \left[\frac{\text{(Nilai investasi tahun n - nilai investasi tahun n-1)}}{\text{nilai investasi tahun n-1}} \right] \times 100\%$$

Nilai investasi sektor industri pengolahan non migas Kabupaten Blitar pada tahun 2024 tercatat sebesar Rp. 188.961.275.777,- melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp. 161.662.000.000,- (tercapai 116,89%). Capaian tersebut apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2023 (Rp. 187.915.022.809,-) mengalami peningkatan sebesar 87,01%, %, jauh melampaui target yang ditetapkan yaitu 17,23% (tingkat capaian 21,9%, **sangat tinggi**) sebagaimana disajikan pada Tabel 3.18 di atas. Apabila dirata-rata capaian kinerja indikator pertama dan kedua adalah 168,5% (**sangat tinggi**).

Gambar 3.3
Nilai Investasi Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025.

Realisasi kinerja tahun 2024 pada tahapan Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2022 dan 2023. Peningkatan kinerja ini lebih banyak disebabkan oleh diundangkannya Undang-Undang Cipta Kerja yang membuka kesan bagi sektor usaha untuk berkembang dengan lebih mudah, serta pelaksanaan program kegiatan yang . Berikut perbandingan capaian kinerja dari tahun 2022 – 2024.

Tabel 2.19
Perkembangan Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja
Sektor Industri Pengolahan

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi		
			Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	9,39%	4,14%	5,64%
		b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	14,30%	18,50%	37,01%

Selain itu, capaian kinerja tahun 2024 ini menjadi capaian tahun ketiga dari periode Renstra Tahun 2021-2026. Berikut perbandingan capaian kinerja Tahun 2024 terhadap target jangka menengah Renstra.

Tabel 2.20

Pencapaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan Terhadap Target Jangka Menengah Renstra

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah Renstra	Realisasi Tahun 2024	Persentase capaian
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	3 %	5,64%	127,87%
		b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	17 %	37,01%	217,71%
	Rata-rata				172,79%

Apabila dibandingkan dengan realisasi kinerja di Tingkat Provinsi Jawa Timur, maka capaian kinerja Meningkatnya Kinerja Industri Pengolahan baik pada indikator Pertumbuhan Industri maupun Peningkatan Nilai Investasi Industri Kabupaten Blitar adalah lebih tinggi sebagaimana disajikan pada Tabel 2.21. Hal tersebut menunjukkan bahwa upaya yang dilakukan telah memberikan dampak yang signifikan dalam pencapaian kinerja. Berikut perbandingan capaian kinerja pada tingkat Provinsi Jawa Timur.

Tabel 3.21
Perbandingan Capaian Kinerja Sasaran Kabupaten Blitar
dengan Capaian Provinsi Jawa Timur Tahun 2024

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kabupaten	Realisasi Provinsi Jatim
1.	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a. Pertumbuhan Industri	2,84%	1,10%
		b. Peningkatan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	37,01%	0,85%

Sumber: Disperindag Kab. Blitar dan Disperindag Prov. Jatim, 2025

Untuk mencapai target kinerja diatas, pada Tahun 2024 Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar telah melakukan beberapa upaya dalam mengungkit kinerja yang diharapkan. Beberapa upaya yang dilakukan yaitu:

a. Melaksanakan fasilitasi standarisasi produk industri.
b. Meningkatkan kualitas SDM industri pengolahan
c. Meningkatkan daya saing produk olahan dari Kabupaten Blitar dengan pelatihan-pelatihan peningkatan mutu dan kemasan produk yang modern, kurasi produk secara periodic, melanjutkan Adi Ekspor yang terverifikasi, fasilitasi pendaftaran merek dagang, sertifikasi halal dan mendaftarkan legalisasi hak kekayaan intelektual berupa Merek Dagang, uji nutrisi terhadap produk asli temuan/inovasi anak bangsa agar tidak mudah ditiplagiasi/ dibajak.
d. Memberikan informasi terkait industri secara transparan melalui media massa (Instagram)
e. Pemberian rekomendasi perijinan pada OSS pada industri dengan Tingkat Risiko Menengah Tinggi sampai dengan Tinggi.

Dari seluruh upaya yang telah dilakukan pada tahun 2024 masih ditemui kendala dan hambatan. Kendala dan hambatan tersebut sebagian besar telah dapat diatasi sehingga realisasi kinerja dapat tercapai secara optimal. Kendala dan hambatan dalam pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan adalah sebagai berikut :

a. Belum optimalnya penerapan standardisasi, sertifikasi, desain produk, mutu produk dan teknologi industri oleh pelaku industri pengolahan, dan

b. Rendahnya kesadaran pelaku industri pengolahan untuk melindungi produknya dari pembajakan/plagiasi dengan mengurus hak paten disamping merek dagang.

c. Minimnya jumlah industri kecil menangah yang mendaftar di SIINas apabila dibandingkan dengan jumlah IKM yang terdapat di data base Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Siltar disebabkan persyaratan dan proses pendaftaran pada system tersebut relatif rumit.

Untuk meningkatkan kinerja pada tahun berikutnya maka perlu adanya alternatif solusi sebagai rencana tindak lanjut untuk mewujudkan kinerja sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan sebagai berikut :

a. Meningkatkan fasilitasi berupa pendampingan, pelatihan maupun bimbingan teknis kepada pelaku usaha industri pengolahan dalam hal sertifikasi maupun standarisasi produk, peningkatan kualitas produk yang meliputi mutu produk dan desain kemasan serta penggunaan teknologi industri.

b. Perlunya dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) terhadap pelaku industri pengolahan tentang urgensi perlindungan HKI bagi peningkatan daya saing dan keberlangsungan usaha.

c. Perlunya dilakukan upaya serta terobosan yang lebih kreatif dalam mendorong industri untuk aktif mendaftarkan diri di SIINas, serta meningkatkan koordinasi maupun kolaborasi dengan stakeholder.

Realisasi kinerja di atas didukung oleh penggunaan sumber daya termasuk anggaran. Jumlah alokasi anggaran pada program kegiatan yang digunakan untuk mewujudkan sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar Rp. 1.261.512.000 dengan realisasi sebesar Rp. 1.208.607.029. Berikut rincian realisasi anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan.

Tabel 3.22

Realisasi Anggaran dalam Mendukung Pencapaian Sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		%
				Alokasi	Realisasi	
[illegible]	Meningkatnya [illegible] Sektor	188,8%	PROGRAM PERENCANAAN	1.255.112.000	1.205.694.129	97,61

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
	Industri Pengolahan		DAN PENGENDALIAN INDUSTRI			
			Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	1.233.112.000	205.894.127	97,61
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	273.430.000	266.938.070	97,63
			Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembinaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	959.682.000	936.736.055	97,61
			PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	13.200.000	10.848.116	82,18
			Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/ Kota	13.200.000	10.848.116	82,18
			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Perizinan di Bidang Industri dalam Lingkup IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota	8.000.000	5.200.116	64,00
			Fasilitasi verifikasi persyaratan/ standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis	8.200.000	7.648.000	93,27

No.	Sasaran	Capaian Kinerja	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran		
				Alokasi	Realisasi	%
			modul melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)			
			PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	15.000.000	14.095.090	93,97
			Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	15.000.000	14.095.090	93,97
			Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kewenangan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)	15.000.000	14.095.090	93,97
			Realisasi Anggaran	1.361.312.000	1.328.637.329	97,41
			Tingkat Efisiensi			99,48%

Rumus Efisiensi Sumber Daya:

$E = [\sum (PARi \times CKi) - RARi) / \sum (PARi \times CKi)] \times 100\%$

Keterangan : E : Efisiensi

PARi : Pagu Anggaran Keluaran i

RARi : Realisasi Anggaran Keluaran i

CKi : Capaian Keluaran i

Berdasarkan capaian kinerja dan realisasi anggaran program dan kegiatan diatas maka dapat diketahui efisiensi penggunaan sumber

daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan adalah sebesar 188,9% sedangkan realisasi anggaran diperoleh sebesar 97,41%. Oleh karena itu efisiensi penggunaan sumber daya dalam mencapai sasaran Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan dengan nilai efisiensi sebesar 99,48% (efisien).

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Industri Pengolahan

Capaian kinerja pada Sasaran Strategis Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan tidak lepas dari dukungan Program/kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2024. Uraian terkait Program/Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja sasaran strategis Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Biak Tahun 2024 dijelaskan sebagai berikut:

1. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri.

   Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyusunan, Penerapan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 1.248.112.000,- dan terealisasi sebesar Rp 1.203.694.125,- atau 97,61%.

   Analisis Program/Kegiatan Pada Tahun 2024:

   Indikator program Perencanaan dan Pembangunan Industri adalah persentase pemenuhan capaian perencanaan dan pembangunan industri yang diharapkan terealisasi sesuai target yaitu 100%. Capaian ini mencakup pelatihan/fasilitasi yang diberikan telah terlaksana 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun penyerapan anggaran telah terealisasi sebesar 97,61%. Secara umum kegiatan/sub kegiatan pada program ini telah terealisasi dengan baik.

2. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota

   Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 10.200.000,- dan terealisasi sebesar Rp 10.848.116,- atau 82,19%.

Analisis Program/Kegiatan Pada Tahun 2024:

Indikator program ini adalah Persentase rekomendasi teknis perizinan industri yang diterbitkan berhasil terealisasi sebesar 100%. Kegiatan yang dilakukan adalah penerbitan rekomendasi teknis izin usaha industri yang masuk. Dari total 21 rekomendasi, seluruhnya (100%) berhasil diterbitkan rekomendasi. Ini menunjukkan kinerja yang sangat baik dari segi efektivitas output. Sedangkan tingkat realisasi anggaran sebesar 92,16% menunjukkan bahwa sebagian besar kegiatan telah dijalankan dengan baik, namun belum mencapai serapan penuh (100%), meski output dari sub kegiatan telah mencapai target yang diharapkan.

8. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional

Program ini didukung oleh 1 (satu) kegiatan, yaitu Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/ Kota dengan Pagu anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan terealisasi sebesar Rp. 14.098.090,- atau 93,97%.

Analisis Program/Kegiatan Pada Tahun 2024:

Indikator program ini adalah persentase peningkatan penyediaan informasi industri terealisasi 3,83% melampaui target yang ditetapkan yaitu sebesar 2,00%. Peningkatan penyediaan informasi industri ini dapat dicapai dengan adanya peningkatan jumlah data industri yang disebarkan, dicapai dengan melaksanakan fasilitasi berupa pendampingan kepada pelaku usaha industry baik secara langsung maupun melalui media elektronik. Secara umum kegiatan/sub kegiatan pada program ini telah terealisasi dengan baik.

Berikut disajikan beberapa data kinerja pada Urusan Industri sebagai pendukung keberhasilan dalam pencapaian Sasaran Strategis tahun 2024:

Capaian Indikator Kinerja Kunci penyelenggaraan Urusan Perindustrian juga diukur melalui beberapa indikator, sebagai berikut:

Tabel 3.23
Capaian Indikator Kinerja Kunci
Atas Penyelenggaraan Urusan Perindustrian Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	Satuan	2021	2022	2023	2024	
						Target	Realisasi
1.	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	%	5,43	10,75	5,33	5,43	6,62
2.	Persentase Kontribusi Sektor Industri Pengolahan Nonmigas Terhadap PDRB	%	14,04	14,78	14,91	14,32	13,46
3.	Nilai Ekspor Produk Industri Pengolahan Nonmigas	Juta Rupiah	7.886	8.063	25.162	24.520	14.811
4.	Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Nonmigas	Orang	87.940	91.582	94.109	97.321	97.326
5	Nilai Investasi Sektor Industri Pengolahan Non Migas	Juta Rupiah	101.469	119.972	137.918	161.660	188.961

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025.

Tabel 3.24
Capaian Target Tahapan Penyelesaian RPIK 2024-2044

No	Tahapan RPIK	Capaian (%)	Keterangan
1.	Terwujudnya rencana investasi	50	Ditetapkannya Perda Kab. Blitar No. 02 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Industri Kabupaten Blitar (RPIK) Tahun 2024-2044 Nilai Akumulasi : 100%
2.	Terwujudnya Draft Raperda RPIK	20	
3.	Draft Raperda RPIK yang disetujui DPRD dan mendapat Rekomendasi Gubernur Provinsi Jatim	20	
4.	Penetapan Draft Raperda RPIK oleh Gubernur Jatim	10	
5.	Penetapan Perda RPIK	10	

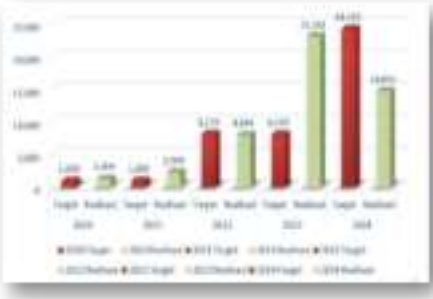
Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025.

Tabel 3.25
Fasilitasi Standardisasi Produk Industri Kabupaten Blitar
Tahun 2022 – 2024

No	Fasilitasi Standardisasi	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sertifikat Halal	0	0	22	33	11
2.	Uji Rumin	0	0	0	11	0
Total Standardisasi		0	0	22	44	11
No.	**Fasilitasi Kabupaten Intelektual**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**	**2024**
1.	Merek	120	0	100	280	24
Total Kabupaten Intelektual		0	0	0	0	0
Total Fasilitasi		120	0	100	280	24

Sumber : Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kab. Blitar, 2025.

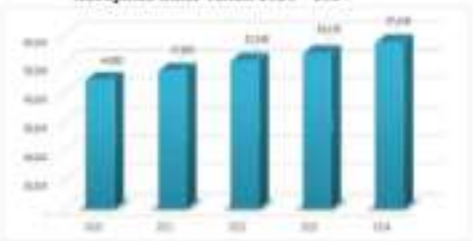
Gambar 3.1
Nilai Ekspor Industri Pengolahan Non Migas
Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025.

Selaras dengan peningkatan capaian pertumbuhan industri pengolahan non migas, jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas pada tahun 2024 tercatat sebanyak 97.888 orang, melampaui target yang ditetapkan yaitu 97.821 orang. Hal ini juga relevan dengan meningkatnya jumlah industri pengolahan di Kabupaten Blitar. Gambaran peningkatan jumlah tenaga kerja sektor industri pengolahan non migas tersebut disajikan pada grafik dibawah ini.

Gambar 3.2
Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri Pengolahan Non Migas
Kabupaten Blitar Tahun 2020 – 2024



Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, 2025.

C. Realisasi Anggaran

Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar tahun anggaran 2024 berdasarkan realisasi kinerja sasaran dan keuangan adalah sebagai berikut :

Tabel 3.28

Realisasi Kinerja Sasaran dan Keuangan

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai dan Predikat SAKIP	71/BB	71,62/BB	100,86	7.788.309.000	7.612.880.000	96,74
2	Meningkatnya Kinerja Perdagangan	PDRB Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (ADHK)	5.733 Miliar Rupiah	5.699,73 Miliar Rupiah	99,42	3.498.973.647	3.447.748.000	98,07
3	Meningkatnya Kinerja Sektor Industri Pengolahan	a.Pertumbuhan Industri	2,58%	3,83%	162	1.261.313.000	1.228.637.000	97,41
		b.Penerapan Nilai Investasi Industri Pengolahan Non Migas	17,22%	37,01%	215			
		Rata-rata			188,5			

Secara umum pelaksanaan program/kegiatan pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar pada tahun 2024 berjalan dengan baik sesuai dengan yang direncanakan. Berdasarkan tabel di atas diketahui bahwa realisasi anggaran program pada setiap sasaran strategis tercapai diatas 95% sehingga didapatkan secara total realisasi anggaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan tersarap sebesar 97,18%.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 merupakan laporan pertanggungjawaban atas pencapaian pelaksanaan kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan menuju *good governance* dengan menyesuaikan dan mengacu pada Renstra Dinas Perindustrian dan Perdagangan Tahun 2021-2026. Penyusunan Laporan Kinerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Reviu Atas Laporan Kinerja.

Sebagai instansi yang bertugas membina dan mengembangkan sektor industri dan sektor perdagangan telah mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi yang diembannya. Hal ini dapat dilihat pada capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2024 yang secara umum telah memenuhi target yang ditetapkan.

TUJUAN : Meningkatnya Produktivitas Industri dan Perdagangan Sektor Unggulan Daerah, dengan indikator :

a. *Pertumbuhan PDRB Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor*, tercapai 5,53%,
b. *Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Industri Pengolahan*, tercapai 6,62%

Pencapaian kinerja produktivitas industri dan perdagangan di Kabupaten Blitar pada tahun 2024 telah tercapai yaitu dengan peningkatan atau pertumbuhan di sektor perdagangan sebesar 5,53% dan di sektor industri meningkat atau tumbuh 6,62%. Hal ini menunjukkan adanya kinerja yang masih terjaga ditengah kondisi global yang penuh dengan ketidakpastian.

Capaian rata-rata kinerja sasaran Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 terhadap 8 sasaran strategis dengan 4 indikator kinerja sasaran adalah 129,87% (**sangat tinggi**) dengan tingkat efisiensi 98,97% (**efisien**). Capaian kinerja dan tingkat efisiensi pada setiap sasaran strategis dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah tercapai

100,80% **(sangat tinggi)** dengan tingkat efisiensi 98,80% **efisien)**.

b. Meningkatnya Kinerja Perdagangan tercapai 99,42% **(sangat tinggi)**. dengan tingkat efisiensi 99,01% **(efisien)**.

c. Meningkatnya Kinerja Sektor Industri tercapai rata-rata 100,8% **(sangat tinggi)**. dengan tingkat efisiensi 99,48% **(efisien)**.

Keberhasilan ini juga diraihkan dengan diraihnya penghargaan bergengsi di Tingkat Nasional oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar, yaitu Penghargaan *"Pasar Tertib Ukur Tahun 2023"* dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebanyak 5 (lima) pasar di Kabupaten Blitar yaitu Pasar Desa Slorok, Pasar Kademangan, Pasar Lodoyo, Pasar Srengat dan Pasar Talun. Penghargaan diserahkan oleh Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia pada *Event Penganugerahan Penghargaan Perlindungan Konsumen Tahun 2024*, tanggal 18 November 2024 di Kota Banjarmasin, Provinsi Kalimantan Selatan. Dengan demikian Kabupaten Blitar berhasil meraih Penghargaan Perlindungan Konsumen Tingkat Nasional dua tahun berturut-turut setelah sebelumnya pada tahun 2020 juga meraihnya *"Penghargaan Daerah Tertib Ukur Tahun 2022"*.

B. Permasalahan dan Kendala

Dalam menjalankan Urusan Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar masih menghadapi masalah sebagai berikut:

a. Kurangnya dukungan SDM yang berkompeten;

b. Belum tersedia Aplikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal.

c. Menurunnya nilai ekspor dari Kabupaten Blitar karena menurunnya permintaan produk dari luar negeri akibat adanya penurunan daya beli buyer serta persaingan harga dengan produk local.

d. Penurunan jumlah alat UTTP yang dilayani tera/tera ulang disebabkan beberapa faktor baik internal maupun eksternal ;

e. Belum diterapkannya e-retribusi secara maksimal.

f. Masih banyaknya fasilitas pasar yang belum memadai.

g. Belum tersedianya system berbasis elektronik sebagai sarana menghimpun data teknis yang akurat dari para pelaku usaha;

h. Penguasaanbelum Penguasaan teknologi dan jaringan para pelaku usaha perdagangan ekspor dari Kabupaten Blitar sehingga mayoritas belum ekspor secara mandiri.

i. Belum optimalnya penerapan standardisasi, sertifikasi, desain produk, mutu produk dan teknologi industri oleh pelaku industri pengolahan;

j. Rendahnya kesadaran pelaku industri pengolahan untuk melindungi produknya dari pembajakan/plagiasi dengan mengurus hak paten disamping merek dagang

C. Rencana Tindak Lanjut

Langkah-langkah kedepan yang direkomendasikan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar dalam upaya meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan publik yang lebih baik, antara lain:

a. Memenuhi kekurangan SDM yang kompeten melalui pengusulan pada rekrutmen CPNS, pengangkatan PPPK dan mutasi.

b. Menggunakan Aplikasi Penilaian Akuntabilitas Kinerja Internal perangkat daerah apabila telah tersedia.

c. Meningkatkan daya saing produk layak ekspor dari Kabupaten Blitar dengan pelatihan-pelatihan peningkatan mutu dan kemasan produk yang modern, kurasi produk secara periodic, melanjutkan Adi Ekspor yang terevaluasi, fasilitasi pendaftaran merek dagang, sertifikasi halal dan mensupport legalitasi hak paten terhadap produk adi temuan /inovasi anak bangsa agar tidak mudah diplagiasi /dibajak.

d. Tetap melakukan sosialisasi tentang pentingnya tertib wajar terhadap alat UTTP serta menyarankan jumlah potensi UTTP daerah sesuai dengan kondisi terkini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

e. Melaksanakan Sosialisasi Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bagi pedagang pasar, pengelola pasar dan pemungut retribusi pasar.

f. Revitalisasi pasar rakyat kabupaten sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari serta pusat aktivitas ekonomi, yang akan terus berbenah dan berinovasi untuk mengambil ceruk bisnis sesuai dengan perkembangan yang ada sehingga berdampak pada meningkatnya ekonomi masyarakat dan daya saing daerah.

a. Mendorong upaya penerapan teknologi informasi untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih baik;

b. Memberikan fasilitasi kepada para pelaku usaha pada event-event promosi, temu usaha/temu bisnis untuk meningkatkan pengalaman, peluang dan relationship

i. Meningkatkan fasilitasi berupa pendampingan, pelatihan maupun bimbingan teknis kepada pelaku usaha industri pengolahan dalam hal sertifikasi maupun standarisasi produk, peningkatan kualitas produk yang meliputi mutu produk dan desain kemasan serta penggunaan teknologi industri; dan

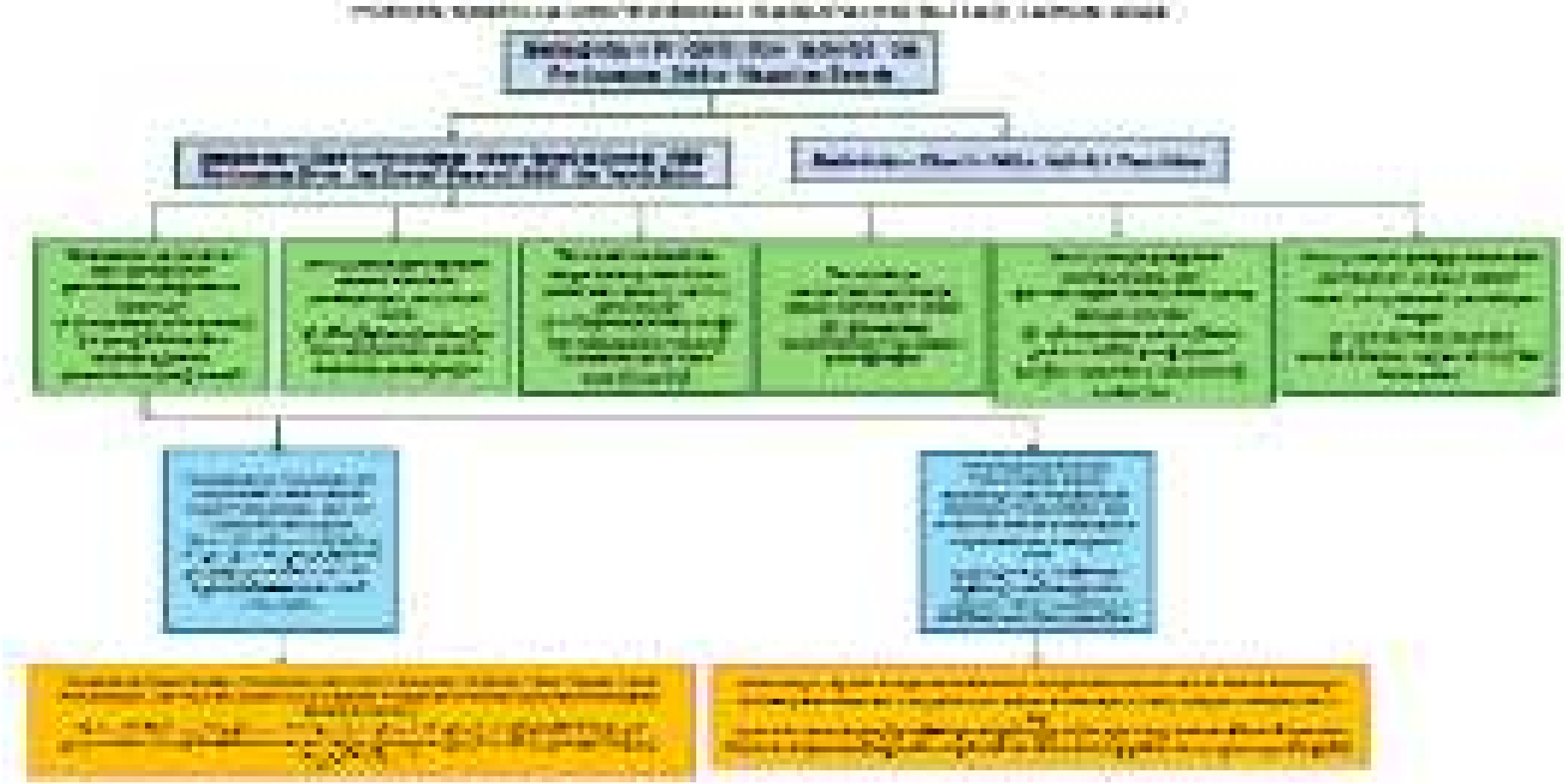
j. Perlunya dilakukan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) bersama pelaku industri pengolahan tentang urgensi perlindungan HKI bagi peningkatan daya saing dan keberlangsungan usaha.

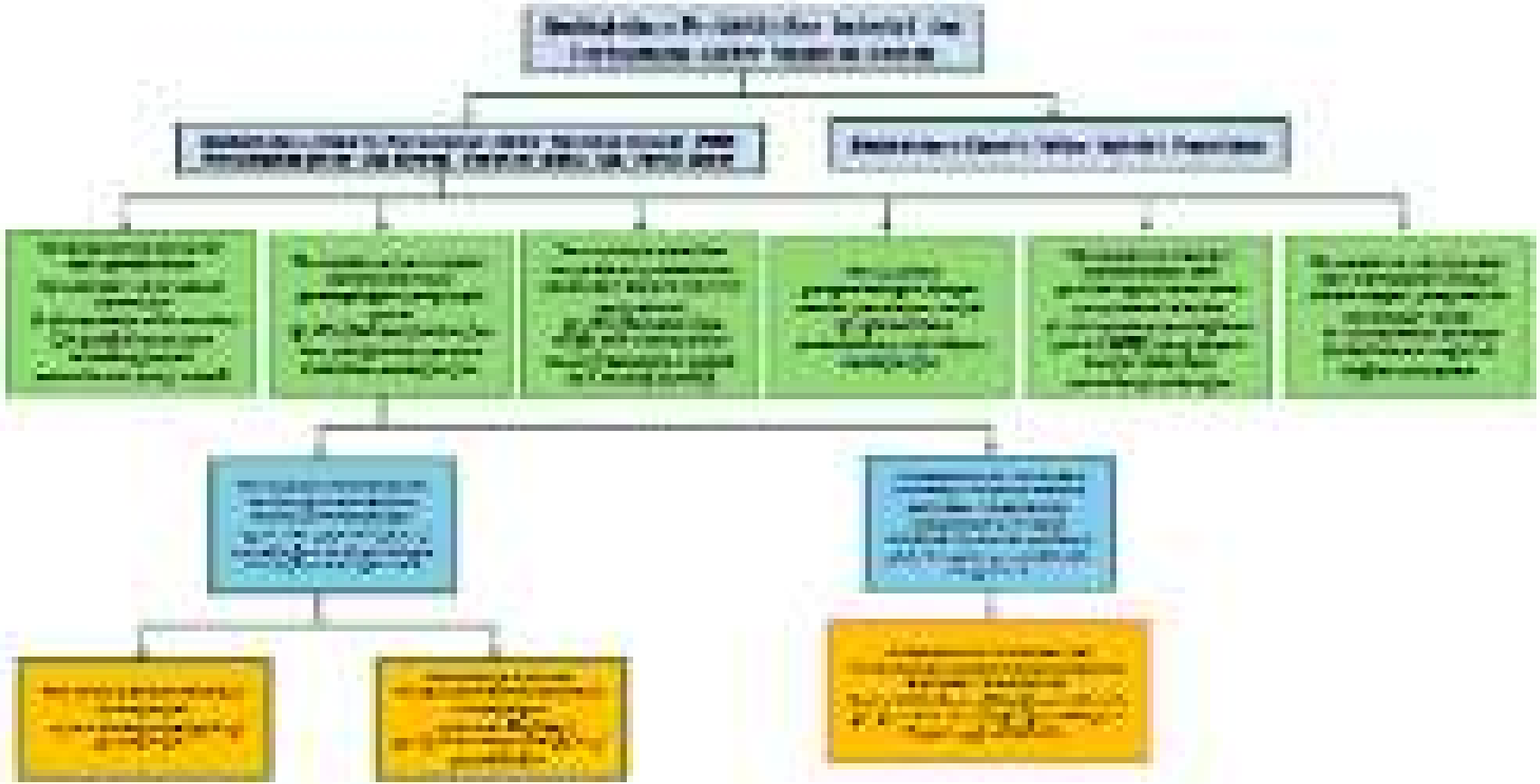
Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Blitar Tahun 2024 yang menggambarkan capaian kinerja tiap-tiap sasaran strategis dalam mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Blitar.

Blitar, 28 Februari 2025
Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Blitar,

DARMADI, S.Sos., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19700403 199103 1 002

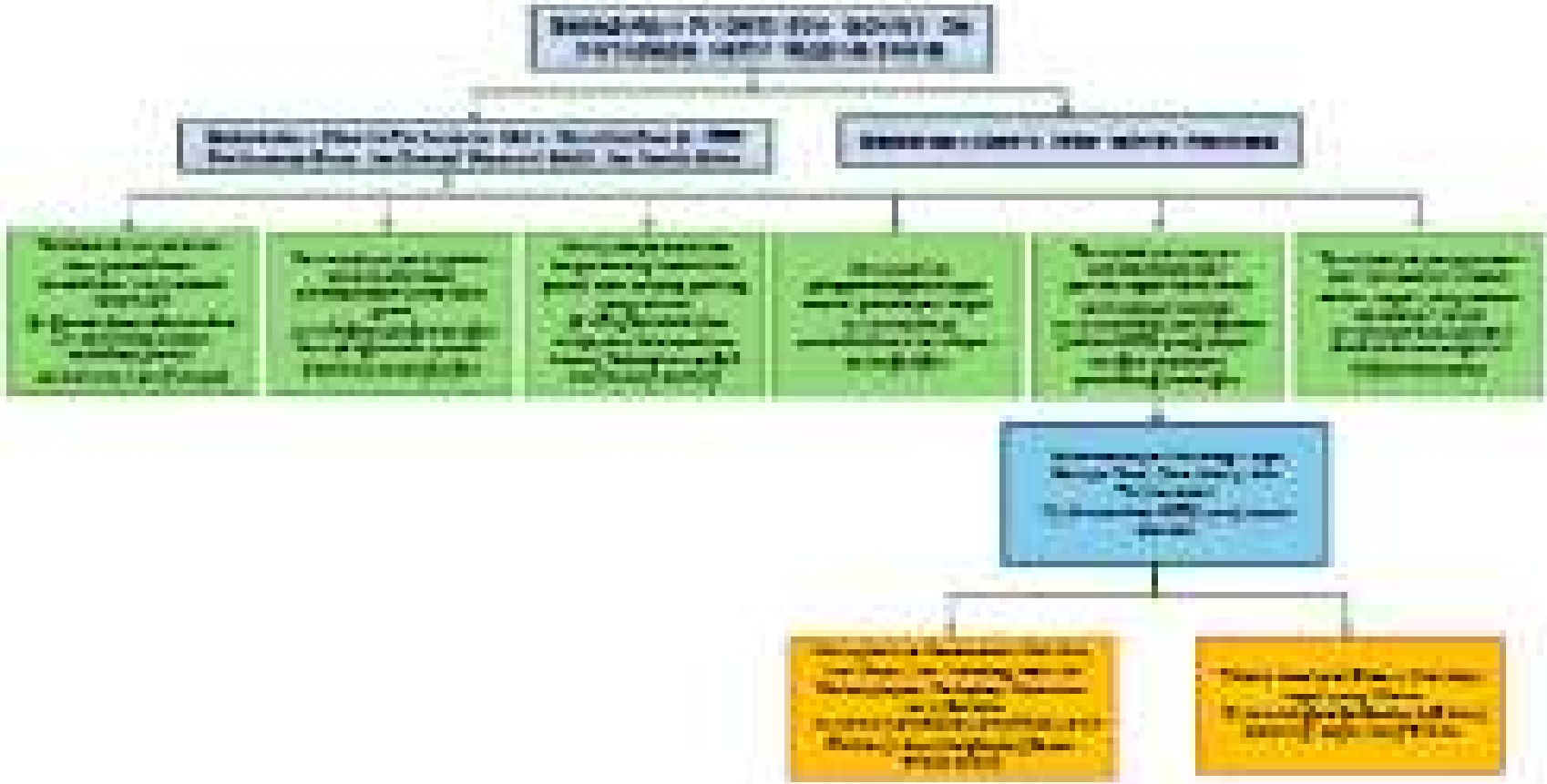
LAMPIRAN



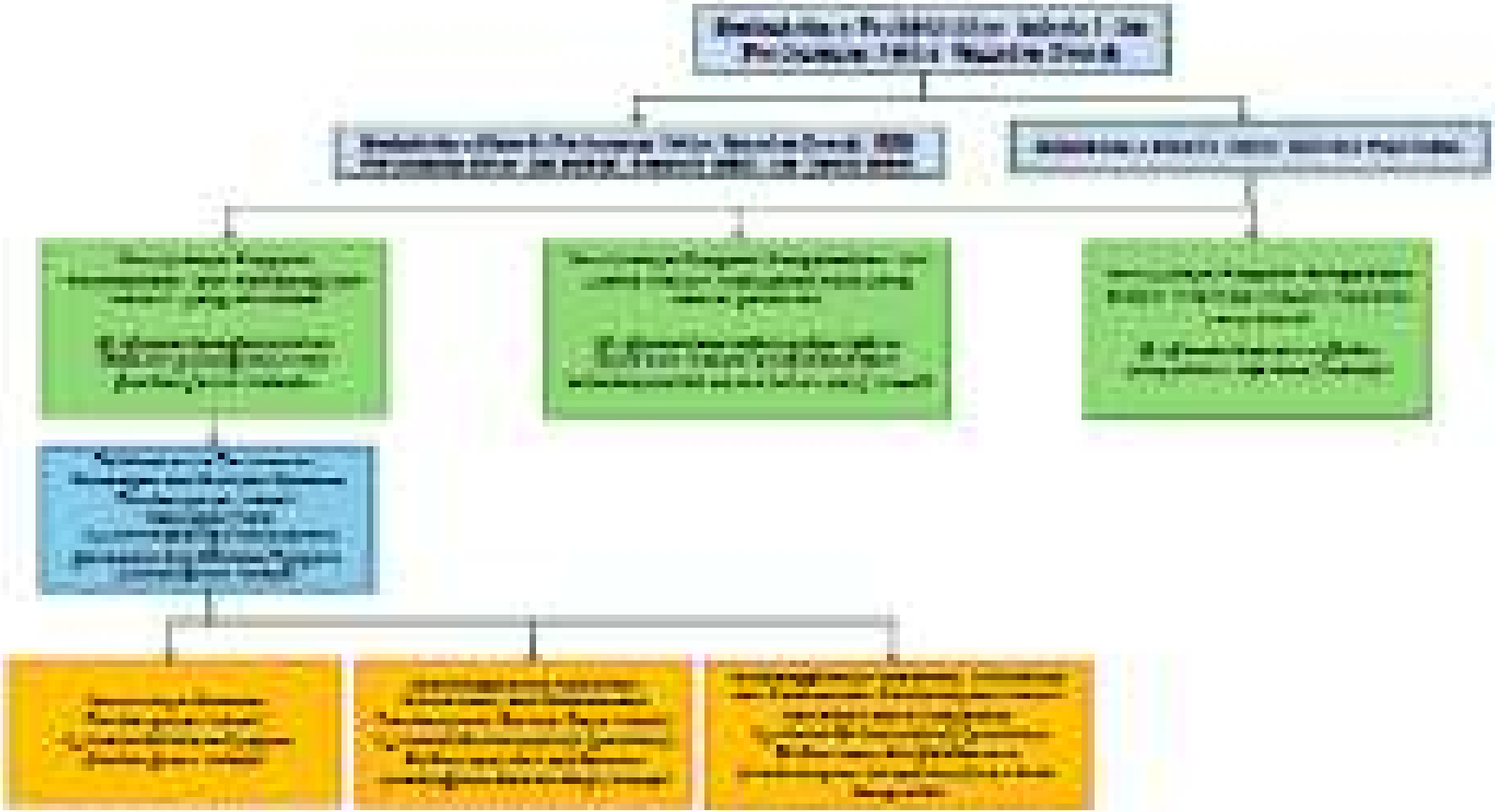
















[illegible]

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

































